

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LIMU POLITIK**

---

---

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM  
MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DIKECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN  
( Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Ambar Sawitri**

**NPM : 147110057**

**PROGRAM STUDI**

**ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2019**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSERTA SKRIPSI PEMBIMBING  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama : Ambar Sawitri  
NPM : 147110057  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)

Format sistematis dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensi.

Pekanbaru, 15 April 2019

Pembimbing I, Pembimbing II,

  
Dr. Parjyana, M.Si

  
Budi Muliarto, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

  
Hendry Andry, S.Sos, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PERSETUJUAN TIM PENYAJI UJIAN

Nama	Ambar Sawitri
NPM	147110057
Program Studi	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Uki Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penjaji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 15 April 2019

Ketua	Sekretaris
 Nurmasari S.Sos., M.Si.	 Rosmita, S.Sos., M.Si.

Anggota

 Drs. Parjiyana, M.Si.
---

Mengetahui  
Wakil Dekan I,

  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 536/UNR-Fs/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 April 2019 jam 15.00 – 16.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ambar Sawitri  
 NPM : 147110057  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Palauwari (Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah).

Nilai Ujian : Angka : *75,00* Huruf : *B*  
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Numasari, S.Sos., M.Si	Ketua	1. <i>[Signature]</i>
2.	Rosmita, S.Sos., M.Si.	Bekretaris	2. <i>[Signature]</i>
3.	Drs. Pariyana, M.Si.	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	Budi Mufianto, S.IP., M.Si	Anggota	4.
5.	Hendry Andriyanto, S.Sos., M.Si	Anggota	5.
6.	Made Devi Widyandari, S.Pd., M.Pd.	Notulen	6.

Dekan No: 104/2019  
 04 April 2019  
 Dekan

Muhammad Soyo Prihatin, S.IP., M.Si.  
 Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 326/UJR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1998 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendikbud RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR.  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UJR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Ambar Sawitri
N.P.M	: 147110057
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Uki Kabupaten Pelalawan ( Studi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah ).

1. Nurmasari, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Rosnita, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Drs. Parjanto, M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Budi Muliarto, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.AP	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 April 2019  
An. Dekan,  
  
DR. H. Pribca Setyo Pribatin, S.In., M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :  
1. Yth. Dekan UIR  
2. Yth. Sek. Ka. Biro Kesatuan UIR  
3. Yth. Ketua Prodi  
4. Arsip —————



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ambar Sawitri  
NPM : 147110057  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Uku Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2019  
An. Tim Penguji  
Sekretaris

*Nurmasari*  
Nurmasari S.Sos., M.Si.  
Turut Menyetujui  
Wakil Dekan I

*Rosnita*  
Rosnita, S.Sos., M.Si.  
Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua

*H. Panca Setyo Prihatin*  
Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

*Hendry Andry*  
Hendry Andry, S.Sos., M.Si.

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini. Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu. Kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Semoga Tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi. Semoga Allah membahagiakan amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”** dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang

berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini.
3. Hendry Andry S.Sos, M.Si. Selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Publik, yang juga telah bersedia memberikan waktunya dalam memberikan masukan-masukan yang berguna dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Nurmasari S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya.
5. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung penulis dapat menyelesaikan usulan Skripsi ini terhadap apa yang telah di arahkan.

6. Bapak Budi Muliato, S.IP, M.Si yang menjadi Pembimbing II saya yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa kepada saya didalam proses penyelesaian Skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.
9. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pegawai kantor Kecamatan Ukui dan Kantor Desa Bukit Gajah yang telah berkenan memberikan saya data-data yang berguna untuk menyempurnakan Usulan Penelitian ini. Begitu juga dengan masyarakat yang telah bersedia penulis wawancarai.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Esa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin ya robbal alamin.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 07 Februari

2019

Penulis

Ambar Sawitri

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Manfaat Penelitian.....	18
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Administrasi.....	20
a. Pengertian Administrasi.....	20
b. Fungsi Administrasi.....	25
c. Ruang Lingkup Administrasi.....	26
2. Organisasi.....	27
a. Pengertian Organisasi.....	27
b. Unsur-unsur Organisasi.....	28
c. Ciri-ciri Organisasi.....	29
3. Manajemen.....	29
a. Pengertian Manajemen.....	29
b. Fungsi-fungsi Manajemen.....	30
4. Manajemen Sumber Daya Manusia.....	32
a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia.....	32
b. Komponen Sumber Daya Manusia.....	33
5. Pelaksanaan Tugas/Implementasi Tugas.....	34
a. Pengertian Pelaksanaan Tugas/Implementasi.....	34
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	36
6. Koordinasi.....	37
a. Pengertian Koordinasi.....	37
b. Bentuk Koordinasi.....	38
c. Tujuan dan Fungsi Koordinasi.....	39
d. Proses Koordinasi.....	40
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi.....	41
7. Pemberdayaan Masyarakat.....	41
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	41

b. Tujuan Pemberdayaan .....	44
c. Tahap-Tahap Pemberdayaan .....	45
8. Wewenang dan Kewenangan Camat.....	45
a. Pengertian Wewenang dan Kewenangan .....	45
b. Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara .....	48
B. Kerangka Pikir .....	49
C. Konsep Operasional .....	51
D. Operasional Variabel.....	54
E. Teknik Pengukuran .....	55
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel .....	59
D. Teknik Penarikan Sampel .....	61
E. Jenis dan Sumber Data .....	62
F. Teknik Pengumpulan Data .....	63
G. Teknik Analisis Data.....	64
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	65
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan.....	66
B. Profil Desa Bukit Gajah .....	74
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	80
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia .....	81
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	82
B. Hasil dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah).....	84
1. Kesatuan Tindakan.....	84
2. Komunikasi .....	90
3. Pembagian Kerja .....	94
4. Disiplin.....	98
C. Rekapitulasi Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah).....	103

- D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah) 105

**BAB VI : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 107  
 B. Saran..... 109

**DAFTAR PUSTAKA ..... 111**

**LAMPIRAN..... 114**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	: Jumlah Penduduk Di Desa Bukit Gajah Tahun 2018 Berdasarkan Umur Masyarakatnya	14
I.2	: Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat yang di anggarkan dalam APBDes Desa Bukit Gajah pada tahun 2018	16
I.3	: Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat yang di anggarkan dalam APBDes Desa Bukit Gajah pada tahun 2018	17
I.4	: Jenis-jenis program pemberdayaan yang di susun oleh kelompok tadi Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	18
II.1	: Operasionalisasi Variabel Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ukui Kabupaten Pelalawan	77
III.1	: Tabel Populasi dan Sampel Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ukui Kabupaten Pelalawan	82
III.2	: Perincian jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ukui Kabupaten Pelalawan	87
IV.1	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Pelalawan 2016.	91
IV.2	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia Di Kabupaten Pelalawan 2016.	92
IV.3	: Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan 2016.	94
V.1	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	105
V.2	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	106
V.3	: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	107
V.4	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Pada Indikator Kesatuan Tindakan	109
V.5	: Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Kesatuan Tindakan	110
V.6	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Pada Indikator Komunikasi	114

V.7	: Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Komunikasi	115
V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Pada Indikator Pembagian Kerja	118
V.9	: Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Pembagian Kerja	119
V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Pada Indikator Disiplin	122
V.11	: Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Disiplin	123
V.12	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai terkait dengan judul Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi:Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)	126



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.I	: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemberlakuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	50
IV.1	: Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	79



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
I	: Kuisioner Untuk Masyarakat dengan judul Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	114
2	: Daftar Wawancara Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	117
3	: Daftar Wawancara Kepala Desa Penelitian Tentang Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	118
4	: Rekap Telly Penelitian Masyarakat Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	121
5	: Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa yang berjudul tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	135
6	: Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Terkait Penelitian Yang Berjudul Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	136
7	: Surat Keterangan Balasan dari Kantor Camat terkait Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	137
8	: Surat Keterangan Balasan dari Kantor Desa terkait Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	138

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ambar Sawitri  
NPM : 147110057  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Februari 2019  
Pelaku Pernyataan,

Ambar Sawitri

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM  
MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN  
(Studi: Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bukit Gajah)**

**ABSTRAK**

Oleh  
Ambar Sawitri

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas Camat, Mengkoordinasikan, Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Indikator dari penelitian ini adalah Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin. Tipe penelitian yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan ini adalah Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Camat Ukui, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa Bukit Gajah, Masyarakat Desa Bukit Gajah. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah Teknik Sensus untuk populasi pegawai dan teknik *accidental sampling* untuk kelompok populasi masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan “Cukup Terlaksana”.

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION DUTY ASSIGNMENT IN  
COORDINATING COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES IN UKUI  
DISTRICT, PELALAWAN DISTRICT  
(Study: Community Empowerment in Bukit Gajah Village)**

ABSTRACT

By

Ambar Sawitri

*Keywords: Implementation of Camat Tasks, Coordinating, Community Empowerment*

*This study aims to analyze the implementation of the Camat's task in coordinating community empowerment activities in Ukui District, Pelalawan Regency. The indicators of this study are Unity of Action, Communication, Division of Work, Discipline. This type of research located in Pelalawan Regency is a Descriptive Survey, which prioritizes the list of questionnaires as a means of collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the research objectives in the studied locations. The population used in this study is the Head of Ukui, Community Development and Empowerment Section, Head of Bukit Gajah Village, Bukit Gajah Village Community. The sampling technique used in determining sample individuals is the Census Technique for the employee population and the accidental sampling technique for the population population group, the types and data collection techniques used in this study consist of, primary data collected using questionnaires and interviews as well as secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Analysis of the Implementation of the Camat's Task in Coordinating Community Empowerment Activities in Ukui Subdistrict, Pelalawan District was "Enough to Implement"*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asal otonomi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranan serta masyarakat. Disamping itu melaalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaaan dan potensi serta keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak di keluarkannya UU 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan menatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut di laksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Agar pembangunan Nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah jelas tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditunjukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Hal tersebutlah yang dapat kita lihat pada Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Kecamatan yang memiliki Desa sebanyak 11 (sebelas) wilayah tersebut menjadi salah satu penyelenggara pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan yang sudah direncanakan ditingkat kecamatan oleh aparat pemerintah kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pemerintah kecamatan dalam proses pembangunan di kecamatan itu sendiri, seperti yang terjadi dikecamatan Ukui, masih kurangnya peran aparat untuk mewujudkan dan peran sertanya dalam proses pembangunan kecamatan serta sistem koordinasi yang lemah merupakan salah satu kendala yang cukup serius dalam pembangunan kecamatan, tentu imbas dari hal tersebut adalah lambat nya tingkat pembangunan di daerah kecamatan itu sendiri yang mana adalah pembangunan di daerah pedesaan di dalam nya.

Secara umum penjelasan mengenai koordinasi pemerintah desa Bukit Gajah dengan pemerintah Kecamatan Ukui dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sudah dikatakan cukup terlaksana dalam beberapa aspek, namun masih belum dapat dikatakan efektif karena masih ditemukan adanya *miss coordination (kesalahan dalam berkoordinasi)* seperti belum proaktifnya pemerintah kecamatan dalam memberikan informasi kepada desa mengenai penyelenggaraan Pemberdayaan didesa melalui dana desa yang dianggarkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kearja atau pelayanan. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaa Nomor 17 Tahun 2018 yakni, “Perangkat Daerah Kabupaten/Kotaa terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan”. Dan adapun yang menjadi wewenang dari sebuah kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 mempunyai tugas yang dapat di lihat pada penjelasan di bawah:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/Kota yang ada dikecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum, karena Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pada pasal 10 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Jadi berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 yang mana telah di jelaskan sebelumnya, bahwa kewenangan Camat adalah sebagai delegatif, atau wewenangnya sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat dengan arti kata Camat ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah ke masyarakat.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah :

- a. Koordinasi Horizontal (Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat). Dalam kaitannya terhadap judul yang sedang penulis kerjakan, koordinasi yang sederajat yang dapat di lakukan oleh seorang Camat adalah koordinasi dengan lembaga-lembaga satuan perangkat daerah seperti Dinas atau Badan yang di tunjuk oleh Bupati/Walikota, Koordinasi secara Horizontal juga berlaku kepada koordinasi antara Seorang Camat dengan Camat lain di lain daerah dimana sama-sama memiliki kedudukan yang sama.
- b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang sederajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka. Dalam pelaksanaan dan hubungannya dengan Camat adalah dimana Camat dapat berkoordinasi dengan lembaga dibawahnya seperti

Kelurahan atau Desa, dimana tujuan dari koordinasi yang dilakukan di sini tentunya untuk menjalankan proses pemerintahan yang terjadi di kawasan Kecamatan itu sendiri seperti pedesaan atau kelurahan.

c. Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat. Dalam kaitannya dengan koordinasi yang dilakukan oleh seorang camat, contoh yang dapat penulis jelaskan adalah kerjasama atau koordinasi yang dapat dilakukan dalam fungsional adalah koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Desa untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di desa, atau berkoordinasi dengan pihak Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan keamanan di kawasan pemerintahan Kecamatan.

Berdasarkan teori di atas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Camat dan Kepala Desa merupakan koordinasi Vertikal. Karna dalam artiannya, Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Dimana dalam hal ini tentunya camat memiliki peran pemerintahan yang lebih tinggi dari pemerintahan di desaa (Kepala Desa).

Selaain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinaasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpaahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitaas dan efisiensi. Eksternalitas

yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkungan kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan dari Kecamatan tersebut.

Kecamatan Ukui merupakan salah satu kecamatan yang telah mengalami pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang bila dibandingkan beberapa kecamatan yang terdapat di kabupaten Pelalawan. Selain itu, Ukui merupakan kecamatan dengan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Ukui yang terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 5 seksi, sekretariat terdiri dari 3 subbagian. Untuk itu, Camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tugas dan fungsi kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini sekaligus menjadi kewenangan Camat yang bersifat delegatif. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini

dimaksudkan agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Pelalawan, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama melakukan pembangunan dengan saaling menjalankan koordinasi pemerintahan yang baik, dengan demikian maka setiap kecamatan yang ada di kabupaten pelalawan memiliki tujuan-tujuan yang menjadi target pemerntahan mereka di setiap tahunnya, untuk mencapai perencanaan tersebut, maka di susunlah Visi dan Misi untuk mencapainya, dimana adapun Visi dan Misi dari Kecamatan Ukui adalah sebagai berikut:

a. Visi Kecamatan Ukui

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin di wujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Ukui merumuskan Visi mereka untuk menjalankan pemerintahannya sebagai berikut: *“Terdepan dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan professional untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera, beriman, aman dan tentram”*. Dimana di dalam Visi tersebut memiliki kandungan arti yang mana bahwa Kecamatan Ukui sangat mengutamakan pelayanan prima yang di dukung oleh Sumber Daaya Manusiaa yang melayaani secara Profesional.

b. Misi Kecamatan Ukui

Dalam rangka mencapai misi Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan tersebut, dimana telah di jelaskan pada pembahasan di atas, maka misi yang akan di jalankan oleh pemerintahan dari Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kopetensi dan sumber daya manusia di lingkungan aparaturnya Kecamatan:
2. Meningkatkan Pelayanan di bidang administrasi kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan wilayah kecamatan secara merata dan terintegrasi dengan membangun sarana penghubung antar desa.
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang berkualitas yang dapat di terima oleh lapisan masyarakat secara professional.

Didasari dari penjelasan-penjelasan yang telah penulis jelaskan di atas, dimana penulis telah menyajikan tugas dan juga visi, misi dari Kecamatan Ukui yang berada di Kabupaten Pelalawan, dari kutipan tugas dan misi tersebut terdapat pembahasan yang berfokus kepada pemberdayaan masyarakat, dimana dengan dasar itu pula, penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberdayaan di Kecamatan Ukui, dimana focus penelitiannya penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bukit Gajah.

Desa bukit gajah merupakan desa yang teletak di kawasan Kecamatan Ukui, tepat nya berada di koordinat 00,36, LS,00.25 BT, Desa Bukit Gajah terbentuk dan terdaftar di kantor pemerintahan pada tahun 1998 dengan SK Gubernur Riau Nomor 487/V/1998.

Desa ini berawal dari kawasan perkebunan pada tahun 1989 dimana perkebunan tersebut bernama PT. Inti Indosawit, kawasan pedesaan ini pada masanya merupakan kawasan pemukiman untuk pekerja di Perusahaan Sawit tersebut, seiring dengan perkembangan jaman, dimana kondisi masyarakat yang semakin ramai dan padat,

maka di dirikanlah sebuah perkampungan yang pada saat itu masih dalam status Desa Persiapan pada tahun 1996, dan berselang beberapa tahun setelahnya barulah di tetapkan sebagai desa definitive sebagai Desa Bukit Gajah pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan SK Gubernur Riau.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil observasi awal penulis kelapangan, jumlah penduduk yang berada di pemerintahan desa Bukit Gajah adalah sebanyak 3355 Jiwa, data ini di dapatkan dari hasil sensus penduduk pada tahun 2016/2017. Dan untuk melihat angka pasti dari jumlah penduduk yang ada pada di Desa Bukit Gajah, maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Taabel I.1 Jumlah Penduduk Di Desa Bukit Gajah Tahun 2018 Berdasarkan Umur Masyarakatnya.**

No	Umur	Jumlah Jiwa / Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	0 – 6 Tahun	264	265	265	263	264
2	7 – 12 Tahun	315	317	318	320	321
3	13 – 18 Tahun	513	514	514	514	515
4	19 – 24 Tahun	514	515	516	518	518
5	25 – 55 Tahun	1607	1607	1609	1609	1610
6	56 – 79 Tahun	107	109	109	110	111
7	80 > Tahun	11	11	12	15	16
<b>Total Jumlah</b>		<b>3319</b>	<b>3325</b>	<b>3330</b>	<b>3349</b>	<b>3355</b>

Sumber : *Olahan Penulis Dan Kantor Desa Bukit Gajah Tahun 2018.*

Berdasarkan jumlah penduduk di Desa bukit gajah yang telah penulis sajikan dalam tabel I.1 di atas, maka penulis pempdapatkan jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Bukit Gajar Kecamatan Ukui adalah berjumlah sebanyak 3355 Jiwa pada tahun 2018, dimana dari jumlah tersebut di bagi atas 953 Kepala Keluarga (KK), dan

dari keseluruhan jumlah Kepala Keluarga yang telah di dapatkan di atas, terbagi lagi menjadi 1715 Jiwa untuk jumlah laki-laki, dan 1640 Jiwa untuk jumlah penduduk perempuan secara keseluruhan.

Desa bukit gajah memiliki pemerintahan desa yang di pimpin oleh Bapak Munjirin sebagai Kepala Desa, dimana di dampingi oleh sekretaris desa yaitu Bapak Bambang Mujianto, dan adapun kaitan antara koordinasi kecamatan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa Bukit Gajah adalah berkaitan dengan pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan di Desa Bukit Gajah pada tahun 2017-2018, berdasarkan data yang penulis dapat di lapangan, dan di lengkapi dengan data hasil print out yang diserahkan langsung oleh sekretaris camat, yaitu bapak Bambang Mujianto, penulis menemukan perencanaan dan juga anggaran untuk pemberdayaan masyarakat sudah di lakukan penganggaran pada awal tahun 2017-2018, dan dalam APBDes tahun 2017-2018, terdapat banyak sekali program pemberdayaan masyarakat yang masuk anggaran dimana pelaksanaan program pemberdayaan, hal ini tentunya menjadi positif bagi masyarakat di Desa Bukit Gajah apabila memang pelaksanaannya dapat di lakukan secara baik dan tepat sasaran, dampak yang dihasilkan tentunya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di desa itu sendiri, karena suatu daerah atau desa dapat dikatakan berkembang atau maju jika taraf perekonomian masyarakatnya sudah stabil dan membaik, hal ini tidak terlepas dari sistem pemerintahannya, karena jika sistem pemerintahannya baik maka pengelolaan dalam suatu sistem tersebut juga bagus termasuk pengelolaan dana yang bisa

membantu perkembangan usaha masyarakatnya. dan adapun jenis programnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Taabel 1.2 Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat yang di anggarkan dalam APBDes Desa Bukit Gajah pada tahun 2017.**

No	Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan APBDes Desa Bukit Gajah Tahun Anggaran 2017			
	Jenis Program	Anggaran Program	Terealisasi	Tidak Terealisasi
1	Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Desa.	Rp 16.500.000	-	√
2	Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJMDesa	Rp 16.028.000	-	√
3	Pelatihan Sistem Keuangan Desa	Rp 3.825.000	√	-
4	Kegiatan Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp 13.200.000	-	√
5	Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD	Rp 24.000.000	-	√
6	Kegiatan Bantuan Insentif MDA	Rp 16.200.000	√	-
7	Kegiatan Penghijauan Lingkungan Fasilitas Umum	Rp 6.919.000	-	√
<b>Total Jumlah</b>		<b>Rp 96.672.000</b>		

Sumber : *Olahan Data Penulis Dan Kantor Desa Bukit Gajah Tahun 2017*

Pada tabel di atas di jelaskan tentang susunan program pemberdayaan masyarakat yang di buat oleh Desaa Bukit Gaajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dari jenis program yang telah di susun dapat di lihat bahwa pelaksanaannya belum semua

tercapai atau terealisasi. Suatu program tidak terlepas pada dana untuk dapat melaksanakannya. Untuk melihat program yang di susun pada tahun 2018, maka penulis juga akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan dana anggaran di bawah ini:

**Tabel 1.3 Jenis-jenis program pemberdayaan masyarakat yang di anggarkan dalam APBDes Desa Bukit Gajah pada tahun 2018.**

No	Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan APBDes Desa Bukit Gajah Tahun Anggaran 2018			
	Jenis Program	Anggaran Program	Terealisasi	Tidak Terealisasi
1	Kegiatan Bantuan Insentif Untuk Kader Kesehatan Masyarakat	Rp 13.200.000	√	-
2	Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD	Rp 30.000.000	-	√
3	Kegiatan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan	Rp 32.400.000	-	√
4	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	Rp 1.100.000	-	√
5	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp 7.655.000	-	√
6	Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Pertanian Dan Belanja Barang Dan Jasa	Rp 30.000.000	-	√
7	Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Usaha Peternakan	Rp 10.000.000	-	√
<b>Total Jumlah</b>		<b>Rp 126.355.000.00,-</b>		

Sumber : *Olahan Data Penulis Dan Kantor Desa Bukit Gajah Tahun 2018*

Berdasarkan data yang telah di sajikan di atas, penulis dapat memberikan penjelasan bahwa anggaran yang telah di sediakan oleh pemerintah desa telah di tetapkan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp 96.672.000 (Sembilan

Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) jumlah itu untuk anggaran tahun 2017, dan pada pelaksanaan program tahun 2018 adalah sebanyak Rp 126.355.000 (Seratus Dua Puluh Enm Jutaa Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) data yang penulis dapatkan di atas bersumber secara langsung dari anggaran APBDes Desa Bukit Gajah pada tahun 2017 dan juga pada tahun 2018, sementara itu pada kenyataannya sampai bulan September tahun 2018, pelaksanaan pemberdayaan belum berjalan sama sekali di Desa Bukit Gajah, hal ini di perkuat dari pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa beberapa kali pihak kelompok tani telah mengajukan proposal untuk pengadaan budi daya ternah, tetapi kenyataannya proposal yang di buat selalu saja mendapatkan penolakan dari pihak Pemerintah Desa Bukit Gajah.

Kelompok Tani ataupun Masyarakat perorangan yang ada di Desa Bukit Gajah sudah beberapa kali melakukan kegiatan musyawarah untuk menciptakan kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat, dimana kegiatan ini bertujuan untuk meminta atau memanfaatkan peluang bantuan yang di berikan oleh pemerintah desa dalam bentuk bantuan dana atau barang guna mendukung kegiatan dari pemberdayaan yang di kelola oleh kelompok tadi tersebut, akan tetapi proposal kegiatan yang di ciptakan tersebut kerap kali mendapatkan penolakan yang di lakukan oleh pihak pemerintah desa, dan adapun jenis pemberdayaan yang telah di coba oleh masyarakat untuk di ajukan kepada pihak Pemerintah Desa adalah:

**Tabel 1.4 Jenis-jenis program pemberdayaan yang di susun oleh kelompok tadi Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.**

No	Jenis Permohonan Pengadaan Program	Terealisasi	Tidak Terealisasi	Dana Yang Diajukan
1	Program Kelompok Masyarakat (Astinapura Farm) Ternak Ayam Buras.	-	√	Rp. 8.000.000
2	Kelompok Usaha Kerja Menengah (Keripik Tempe, Keripik Jamur Sawit)	-	√	Rp. 7.000.000
3	Kelompok Tani Budidaya Jamur Tiram	-	√	Rp. 7.500.000
4	Kelompok Tani Budidaya Bibit Matoa	-	√	Rp. 8.500.000

Sumber : *Olahan Data Penulis Dan Kantor Desa Bukit Gajah Taahun 2018*

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa program yang diajukan oleh masyarakat melalui dalam bentuk proposal, tetapi di tolak atau tidak disetujui oleh pihak pemerintah Desa dengan alasan karena program tersebut belum di realiasikan terlebih dahulu dan belum ada terbentuknya berupa anggota atau kelompok yang menjalankannya. Syarat untuk mengajukan proposal dalam pencairan dana guna pemberdayaan masyarakat adalah punya kelompok, usahanya benar-benar ada, dan bagi proposal yang disetujui mendapatkan dana Rp. 5.000.000 hingga Rp. 6.000.000,, tidak lebih dan kurang dari anggaran yang telah ditetapkan, hal ini juga merupakan salah satu alasan proposal yang diajukan ditolak, karena dana yang diajukan melebihi dengan dana yang dianggarkan.

Dari persoalan di atas jika dilihat dari observasi penulis bahwa usaha yang yang di ajukan proposalnya sudah berjalan tetapi masih dalam skala kecil-kecilan seperti ternak ayam buras ini, dan untuk mengembangkan usahanya agar dapat memperoleh

penghasilan yang banyak dan juga dapat menyerap tenaga kerja, maka dari itu para pemilik usaha tersebut mengajukan proposal untuk meminta dana kepada pemerintah desa. Tetapi permohonan pencairan dana tersebut tidak disetujui padahal dana untuk bidang pengembangan pemberdayaan masyarakat ini sudah ada, tetapi belum disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dan berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di atas, dan di kaitkan dengan fungsi dan tugas dari Pemerintahan di Kecamatan, seharusnya Camat menjalankan tugas nya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah desa guna mengatur dan mengontrol pelaksanaan dari pemerintahan desa tersebut, khususnya di bidang pelaksanaan pemberdayaan, dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam menjalankan tugas nya untuk melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, maka di harapkan adanya perubahan yang terjadi di desa Bukit Gajah. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, dan juga di dukung dengan beberapa penyajian data-data yang telah penulis dapatkan dari lapangan, penulis akan menyajikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dimana berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Camat dalam melakukan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah), adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat belum dapat di rasakan oleh masyarakat desa, dimana anggaran yang telah di sediakan untuk proses pemberdayaan belum di jalan kan oleh pihak Pemerintah Desa, dan

Pengajuan Proposal yang dilakukan oleh kelompok tani guna menciptakan kegiatan pemberdayaan selalu mendapatkan penolakan dari pemerintahan Desa Bukit Gajah.

2. Camat Ukui belum menjalankan tugas yang seharusnya di jalankan di bidang pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Camat Ukui tidak menjalankan Tugaas Pokok dan Fungsinya dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.

Sehubungan belum maksimalnya pelaksanaan Fungsi dan Tugas camat dalam melaksanakan mengkoordinasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. maka keadaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan latar belakang di atas bahwa camat berwenang dalam mengurus dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dimana dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah desa Bukit Gajah, maka adapun rumusan masalah yang penulis tetapkan dalam melakukan penelitian ini adalah.”**Bagaimanakah Pelaksanaan**

**Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)”.**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi : Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah).
  - b. Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam upaya Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang administrasi publik.
  - b. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
  - c. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Kantor Camat Ukui dan juga daesa Bukit Gajah, yang terletak di Kabupaten Pelalawan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**BAB II**  
**STUDI KEPUSTAKAAN**

## A. Studi Kepustakaan

### 1. Administrasi

#### a. Pengertian Administrsi

Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengandaian usaha kerjasama sekelompok manusia orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hadari Nawawi, (dalam Inu Kencana, 2003;5).

Administrasi sebagai salah satu bagian dari studi ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktifitas kerjasama sejumlah manusia didalamnya organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Administrasi menurut Siagian (2014;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggrakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.

Menurut Siagian (2003 ; 2), Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Attmosudirdjo (dalaam Zulkifli, 2009;9) misalnya terpaksa harus merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu:

- 1) Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat  
20  
kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk  
memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi

wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung didalamnya.

- 2) Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan statuta yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*purposee*) dan tujuan-tujuannya (*goaals*), usahanya, sumber pendaanaanya (*financial resources*), serta langka-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuanya.
- 3) Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang mengerakan secara terarah dan bertujuan) oleh administrator.
- 4) Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
- 5) Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masing-masing hirarki organisasi tergambar dalam batasan berikut ini. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana yang di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaaya-sumberdaaya untuk mencaapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Adam (dalam Syafri,2012;8) administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu

dengan yang lainnya didalam suatu organisasi sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Dalam aspek studi ilmu administrasi negara ada beberapa prinsip-prinsip umum yang harus dipahami dan di implementasikan oleh para administrator. Hendri Fayol (dalam Zulkifli, 2005;71) merumuskan 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- 1) Pembagian kerja (*defesien of work*) dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang dalam bidangnya (*spesialisasi*) agar memperoleh efisiensi tertinggi.
- 2) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawaab (*authority and responsibility*) wewenang merupakan haak administrator atau menejer untuk memberikaan perintah dan merupakan suatu yang melekat dalam jabatan administrator atau maanajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggung jawab, baik baagi yang memberi maupun yang menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab perlu untuk dipertimbangkan.
- 3) Disiplin (*discipline*) merupakan hal yang mutlak dalam hal kegiatan kerja sama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan menaati peraturan yang telah di tetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
- 4) Kesatuan perintah (*unity of commaand*) pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pimpinan (atasan).

- 5) Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*) bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh manajer.
- 6) Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) diatas kepentingan pribadi (*subordinaation og individual to general inteerest*) dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
- 7) Pengupahan dan penggajian (*renumeration*) pengkajian dalam metoda pembayarannya harus adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
- 8) Sentralisasi (*centralization*) wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan tetapi tanggung jawab akhir tetap di pegang oleh pimpinan puncak (top manajer) masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan, atau dipusatkan.
- 9) Skala hiarki (*scala skain*) merupakan garis wewenang dan program yang di turunkan dari pinpinan puncak kebawah dan pekerja.
- 10) Tata tertib (*order*) penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.

- 11) Keadilan (*euty*) kesetiaan dan pengabdian anggota harus di imbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan waajar daari manajer terhadapnya.
- 12) Stabilitas jabatan (*stability of tunere*) memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
- 13) Prakaarsa atau inisiatif (*initiatife*) daalam semua tingkataan organisaasi semangaat kerjaa didukung oleh perkembangannya prakaarsa daan karenaanya kepaada bawahaaan perlu diberikaan kebebasan untuk memikirkaan dan mengeluarkan pendapat tentaaang semua aktifitaas, bahkan melihaat dan menilaai kesalaahan-kesaalahan yang terjaadi.
- 14) Solidaritaas kelompook kerjaa (*la esprit decorpss*) prinsip ini meniitik beratkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerja sama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan menigkatkan motivasi kerjaa.

Selanjutnya menurut Hodgkinson (dalam kusdi, 2011;7) Aadministrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan koomponen-komponen manusia dalam organisasi.

Pemerintah menjalankan tugas kerjasama untuk mencapai sasaran pembangunan melalui apaaratur pemerintahan, jaadi dalam hal inii perlu administrasii yang dimaksud atas pemerintah dan masyarakat.

## b. Fungsi Administrasi

Administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam suatu rangkaian tahapan aktivitas. Menurut William H. Newman (1963) fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari:

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*)
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*)
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*)
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*)
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa fungsi administrasi menentukan apa yang dilakukannya (*planning*), penggolongan yang dilakukan secara struktur (*organizing*), menyusun oarang-orang untuk melakukan jenis-jenis kegiatan (*staffing*), menggerakkan daan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*), serta meakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan agar sesuai dengan yang diharapkan.

### c. Ruang Lingkung Administraasi

Ruang Lingkup administrasi dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu sebagai berikut:

3. Administrasi Negara (Public Administratio) yaitu kegiatan-kegiatan/proses/usaha di bidang kenegaraan. Ruang lingkup administrasi negara menurut Handyaningrat terdiri dari:
  - a. Administrasi negara bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (public service)
  - b. Administrasi negara dalam pencapaian tujuannya dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalistic approach)
  - c. Administrasi negara dalaam kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (birokrasi-bureaucracy).
4. Aadministrasi Swasta/Niaga (Private/Businesss Administraasion) yaitu kegiatan-kegiatan /prosees/usaha yang dilakukan di bidang usaha/niaga. Dalam bidang administrasi niaga dapat diartikan sebaagai berikut:
 

“Administrasi Niaga iaalah kegiatan-kegiatan dari pada organisasi-organisasi niaga dalam usahanya mencapai tujuan yaitu mencari keuntungan (profit making). (Handyaningrat, 1994:3-4)

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa administrasi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu Administrasi Keuangan Negara/Publik dan Administraasi Swasta/Niaga. Administrasi Negara adalah prosees kegiatan yaang berhubungan

dengan urusan negara. Sedangkan Administrasi Niaga adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha/niaga/bisnis.

## 2. Organisasi

### a. Pengertian Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dalam pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah. Menurut Ancok (2012;21) organisasi sebagai tempat bagi sejumlah manusia untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan bersama dalam sebuah kelompok.

Menurut Toranag (2013;: 25) Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama .

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta cara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang /sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2008;6).

Konsep organisasi (*organization*) nampaknya merupakan titik sentral dari maksud dan tujuan di aplikasikannya setiap aspek studi administrasi. Bahwa keberadaan setiap aspek studi administrasi itu dimaksudkan untuk memberikan dukungan kepada kebijakan managerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Definisi konsep administrasi dalam arti luas bertitik tolak dari pendekatan multi aspek dan dimensi yang melekat dengan aktivitas organisasi itu. Pendekatan demikian melatarbelakangi beragam redaksionis definisi organisasi yang telah di tulis. Siagian (dalam Zulkifli 2009;:14). Merumuskan definisi organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang di sebut atasan dan seoraang atau sekelompok orang yang di sebut bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2009;14). Yaitu organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok oraang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan hubungan kerjaa dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan bersama.

#### b. Unsur-unsur Organisasi

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2010), menyebutkan bahwa organisasi memiliki 4 unsur:

- a. Sistem organisasi
- b. Pola aktivitas
- c. Sekelompok orang
- d. Tujuan organisasi

### c. Ciri-ciri Organisasi

Menurut Umam (2010), menyebutkan ciri-ciri organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal
- b. Adanya kegiatan berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan kegiatan
- c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain.
- d. Adanya kewenangan, kordinasi dan pengawasan
- e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Hikmat (2009), disebutkan ciri-ciri organisasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal.

1. Organisasi Formal
2. Organisasi Informal

Secara substansial ciri organisasi formal sama dengan organisasi informal, yang membedakan adalah status organisasi dan izin operasional organisasi.

## 3. Manajemen

### a. Pengertian Manajemen

Menurut Manullang (2002;3), Bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain Siagian (1985:5) artinya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari Administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Apabila dilihat dari segi fungsional administrasi mempunyai dua tugas utama yaitu:

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (*organizational goal*).
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi (*general and overall policies*).

Menurut Siswanto (2005:9) manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resource) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

#### **b. Fungsi-Fungsi Manajemen**

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli.

Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pengarahan (actuating) dan

Pengendalian (*controlling*). Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012 : 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*commanding*), Pengkoordinasian (*coordinating*), Pengendalian (*controlling*). Sedangkan menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012 : 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*).

Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*).

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pengarahan (*commanding*)
4. Penggordinasian (*coordinating*)
5. Pengendalian (*controlling*)

Pemahaman mengenai fungsi pengendalian dikemukakan oleh beberapa ahli. Seperti Terry dalam buku *Principles of Manaaagement* mengemukakan pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula agar rencana dapat terselenggara dengan baik.

## **1. Manajemen Sumber Daya Manusia**

### **a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam organisasi. SDM tersebut harus cukup jumlahnya sesuai kebutuhan, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai tuntutan tugas-tugas dalam organisasi. Adapun pengertian sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hani Handoko (2000: 233), sebagai orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usahanya dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Rachmawati (2008: 3) memberikan definisi manajemen SDM sebagai berikut: “Manajemen SDM merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.”

Menurut Hasibuan (2006: 9), manajemen SDM merupakan suatu bidang yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Pembahasannya

mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan itu meliputi perencanaan (human resources planning), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan organisasi, kepuasan karyawan, dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkesinambungan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengintergrasian sumber daya manusia terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.

#### **b. Komponen Sumber Daya Manusia**

Menurut Hasibuan (2002:12) membagikan komponen sumber daya manusia menjadi:

1. Pengusaha, ialah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung laba yang di capai perusahaan tersebut.
2. Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi karyawan dalam suatu perusahaan di bedakan menjadi:
  - a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
  - b. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.

3. Pemimpin, ialah Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocakaan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.

Jadi, jika komponen sumber daya manusia pada organisasi publik adalah pemerintah pusat yang menjadi sumber dari semua kegiatan yang ada pada masing-masing daerah, pemerintah daerah sebagai estafet atau penerus dari rencana-rencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dan pegawai sebagai promotor berjalannya program-program yang telah direncanakan.

## **2. Pelaksanaan Tugas / Implementasi Tugas**

### **a. Pengertian Pelaksanaan Tugas/Implementasi**

Standar Pelaksanaan tugas perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur didalam menjadikan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar bermaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa *actuating* (pelaksanaan) ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan tidak bisa dijalankan karena tidak adanya kontak kendaraan tersebut.

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sudah didesain sedemikian rupa dan telah memiliki kejelasan mekanisme dan prosedur kerja tidak akan berarti apa-apa bagi organisasi jika tidak bertujuan untuk memenuhi kepentingan public atau masyarakat.

Dalam melaksanakan kepentingan masyarakat tersebut tentunya pelaksanaan tugas tersebut harus dilakukan oleh aparatur yang menguasai bidang dan tugas yang diselenggarakan. Pelaksanaan biasa diartikan pelaksanaan atau penerapan, Usman (2004:7) mengemukakan bahwa “Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

“Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat”.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- a) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- c) Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

#### **b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factoriees to poliicy implementaaation they are : “communicaation, resourcees, dispositiion, and bureaaaauratic structure”*.

Menurut Budi Winarno (2002:21) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, daan strategai yang

dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## 2. Koordinasi

### a. Pengertian Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2003:290).

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290). Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (2003:291):

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Menurut Leonard D. White (dalam Inu Kencana, 2011:33).

“Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga

dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil”

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang beerbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.

**b. Bentuk Koordinasi**

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), Bentuk Koordinasi adalah:

a) Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat.

b) Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kaabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

### c) Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Berdasarkan teori di atas maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Camat dan Kepala Desa merupakan koordinasi fungsional. Hal ini didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi tertentu.

### c. Tujuan dan Fungsi Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernologi (2003:295), yaitu:

- a) Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
- b) Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c) Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

### d. Proses Koordinasi

Pencapaian koordinasi yang optimal sangat tergantung pada pemenuhan proses koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007:88), terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu:

- a) Sense Of Cooperation (perasaan untuk bekerjasama). Ini dilihat harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan per orang.
- b) Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
- c) Team Spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d) Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Peningkatan spesialis akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch dalam Handoko (2003:197), mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu:

1. Perbedaan dalam Orientasi Terhadap Tujuan Tertentu
2. Perbedaan dalam Orientasi Waktu
3. Perbedaan dalam Formalitas Struktur

4. Setiap Tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan.

**e. faktor-faktor yang Mempengaruhi Koordinasi**

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

- a. Kesatuan Tindakan.
- b. Komunikasi.
- c. Pembagian Kerja
- d. Disiplin

**3. Pemberdayaan Masyarakat**

**a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Secara Konseptual menurut Suharto (2009:57), pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “Power” (kekuasaan atau keberdayaan). Jadi ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Kebebasan yang dimaksud bisa diciptakan oleh kelompok itu sendiri atau melalui fasilitas pemerintah.

- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Suharto (2009;102) Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaa akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah agar tidak menjadi tambah lemah oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa perlindungan dan pemeliharaan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat dari upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploritasi yang kuat atas yang lemah.

Menurut Totok dan Poerwoko (2012::27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai:

Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebuttuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. World Baank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012: 27) mengartikan pemberdayaan yaitu;

Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan**

Menurut Soerjono Soekanto (1978:75) Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

#### **c. Tahap--Tahap Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi

(Sumodiningraat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004: 82). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004: 83).

#### **4. Wewenang dan Kewenangan Camat**

##### **a. Pengertian Wewenang dan Kewenangan**

Kewenangan memiliki arti yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Wewenang (*Authority*) adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu; authority merupakan dasar yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Hasibuan (2014: 64)

Kewenangan camat terdiri atas 2 macam yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan atributif dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat melaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjad ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan delegatif yang dimaksud yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 yang meliputi :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjanaa pemerintahan atau sertifiikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Berikut tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ukui sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan.
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

**b. Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara**

Menurut Terry Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, Menurut R.C.Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority/Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara* adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa (Moh. Mahfud MD, Sf. Marbun, 2009).

Sejauh ini tugas hanya diartikan menjadi sesuatu yg sudah sewajibnya dan harus dilakukan bagi seorang individu dalam suatu pekerjaannya, mungkin saja dalam aktifitas nya juga. Kesimpulan akhir bahwa tugas dan wewenang memang memiliki perbedaan tetapi tetap dalam suatu hubungan seperti yg dikatakan oleh R.C Davis bahwa tanpa wewenang orang-orang di dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain penyertaan tugas juga berhubungan dengan wewenang., Tugas

pemerintah Indonesia itu cukup luas, salah satunya adalah pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dibidang politik maupun dalam sosial ekonominya dan untuk itu pemerintah mendapat *freies Ermessen* atau kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan sosial, seperti melakukan pengaturan dalam kegiatan-kegiatan dimasyarakat dengan memberi izin, lisensi, dispensasi dan lain--lain atau melakukan pencabutan atas hak-hak warga negara tertentu karenaa diperlukan oleh umum (Moh. Mahfud MD, Sf. Marbun, 2009).

Kewenangan dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan hal tersebut dikarenakan bahwa kekuasaan hanya menggambarkan suatu hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat, dan kalaau wewenang dalam hukum sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dan dalam otonomi daerah hak mengandung arti kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri.

### **B. Kerangka Fikir**

Kerangka pikir ini sangat di perlukan untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari penelitian ini dapat di bahas dengan mudah dan di pahami dengan baik, dan mempermudah bagi peneliti untuk menentukan indikator penelitian dan sumber dari indikator dapat tertera dengan jelas. Adapun kerangka pikirannya dapat dilihat pada gambar II.2:

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat DiKecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan**



*Sumber : Olahan Data Penulis Berdasarkan Teori Hasibuan (2006:88)*

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Hal ini untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dalam mencari sumber-sumber referensi. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional dalam penelitian ini, dan konsep operasionalnya adalah sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisme tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disetujui.
2. Organisasi adalah struktur tata kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang-orang yang harus bekerja sama secara teratur(melalui sistem) untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengatur atau memfungsikan pedagang kaki lima malam.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khususnya mempelajari hubungan dan peranan dalam organisasi.
5. Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

6. Koordinasi adalah kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu.
7. Pemberdayaan masyarakat Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.
8. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada lembaga Negara atau pejabat Negara tertentu di bawahnya, untuk mengeluarkan suatu pengaturan perundang-undangan.
9. Indikator Koordinasi adalah sebaagai berikut:
  - a) Kesaturan Tindakan, merupakan Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai.
  - b) Komunikasi, merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan koordinasi, karena tingkat keberhasilan dalam koordinasi adalah terletak pada komunikasi.

- c) Pembagian Kerja, merupakan perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
- d) Disiplin, merupakan menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.



#### D. Operasionalisasi Variabel

**Tabel II.1 : Operasionalisasi variable Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan**

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Koordinasi adalah Sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsure yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsure itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. (Ndaraha, 2003:291)	Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupeten Pelalawan.	6. Kesatuan Tindakan	a. Pelaksanaan Kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi camat dalam menjalankan pemerintahan Desa. b. Camat Memberikan arahan kepada bawahan untuk melaksanakan program Pemberdayaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul>
		7. Komunikasi	a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang ada di Kecamatan. b. Adanya Sikap terbuka kepada masyarakat akan program yang telah laksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul>
		8. Pembagian Kerja	a. Mengikutsertakan masyarakat pada setiap perencanaan program b. Membangun Koordinasi kepada bidang yang bertanggung jawab dalam menjalankan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul>

			bersama masyarakat	
		9. Disiplin	<p>a. Program yang telah dilaksanakan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan</p> <p>b. Program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana</li> <li>• Cukup Terlaksana</li> <li>• Tidak Terlaksana</li> </ul>

*Sumber : Olahan penulis tahun 2019*

#### **E. Teknik Pengukuran**

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Mencapai Persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Mencapai Persentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Mencapai Persentase 0% - 33%

#### **A. Kesatuan Tindakan**

Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kesatuan Tindakan berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kesatuan Tindakan berada pada skala 34%-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Kesatuan Tindakan berada pada skala 0% - 33%

#### **B. Komunikasi**

Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 34%-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 0% - 33%

#### **C. Pembagian Kerja**



Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pembagian Kerja berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pembagian Kerja berada pada skala 34%-66%

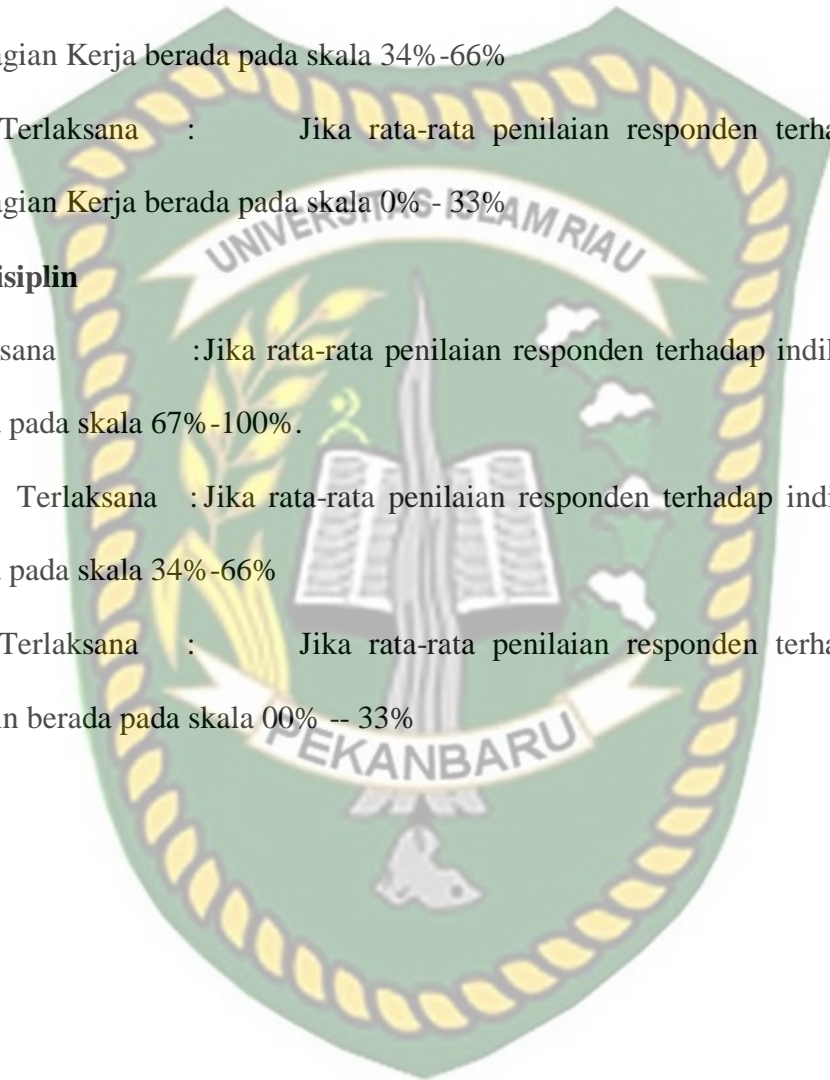
Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pembagian Kerja berada pada skala 0% - 33%

#### **D. Disiplin**

Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disiplin berada pada skala 67%-100%.

Cukup Terlaksana :Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disiplin berada pada skala 34%-66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disiplin berada pada skala 00% -- 33%





### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Peneliti menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

Penelitian deskriptif adalah uraian sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. (Sugiono, 2016;63).

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk penelitian populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

58

1. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Pelalawan tepatnya di Kecamatan Ukui, Desa Bukit Gajah.
2. Kantor Camat Ukui, Dimana Camat memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Kantor Desa Bukit Gajah sebagai penyelenggara pelaksanaan pemerintahan desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Camat Ukui Kabupaten Pelalawan adalah bahwa pemerintahan yang penulis sebutkan tersebut memiliki tugas dalam mengkoordinasikan semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan. Sementara lokasi penulis yang kedua adalah Desa Bukit Gajah, dimana kaitannya dengan kantor Camat Ukui adalah sebagai pelaksana kegiatan yang telah dibangun dan koordinasikan oleh camat dalam menjalankan pemerintahan di kecamatan, dan tentunya alasan lainnya adalah dengan adanya permasalahan-permasalahan yang

penulis jadikan fenomena dalam penelitian ini, seperti belum terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ukui, Desa Bukit Gajah, Kabupaten Pelalawan.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2012;254). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi Kepala Camat Ukui, Sekretaris Kecamatan Ukui, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, serta masyarakat Kecamatan Ukui, yang akan di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tab III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Caamat Di Kecamatan Ukui..**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Ukui (Bpk Amri Juharza, S.Kom)	1	1	100 %
2	Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. (Bpk. Tri Arso Sakti J, S.Sos)	1	1	100 %
3	Kepala Desa Bukit Gajah. (Bpk Taryam, SE)	1	1	100 %
4	Masyarakat Desa Bukit Gajah	3355	97	3.00 %
<b>Jumlah</b>		<b>3358</b>	<b>103</b>	<b>3.00 %</b>

*Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.*

Jumlah populasi untuk masyarakat di desa Bukit Gajah yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3355 jiwa, penelitian ini menggunakan metode slovin dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(N + d^2) + 1}$$

Keterangan

n : Sampel

N : Populasi

d : Besarnya tingkat kesalahan

1 : Konstan

$$n = \frac{3355}{(3355+(0,1)^2)+ 1}$$

$$n = \frac{3355}{(3355+(0,01) )+ 1}$$

$$n = \frac{3355}{34,55}$$

$$n = 97.1 \%$$

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011;91). Ada adapun Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Camat Ukui, Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, dan juga Kepada Desa Bukit Gajah digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah *sensus*, saampling jeenuh adaalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Masyarakat yang berada di desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui digunakan teknik *accidental sampling*, pemilihan sample secara kebetulan atau aksidental, merupakan pemilihan sampel dari siapa saja yang kebetulan ada atau di jumpai menurut keinginan peneliti.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

##### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden
- b. Tanggapan responden tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

##### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Camat Ukui. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Kantor Kecamatan Ukui
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian
- c. Struktur Organisasi Kecamatan Ukui

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

- b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung lapangan. Observasi merupakan teknik

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

**G. Teknik Analisis Data**

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa.

Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.





Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar.

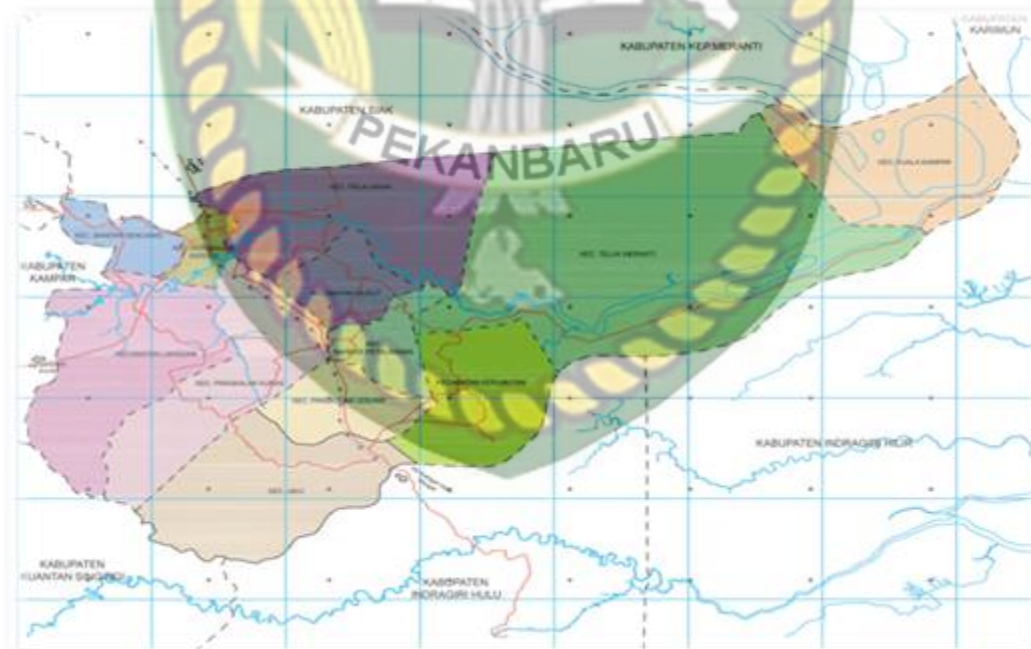
Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km<sup>2</sup>, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintas Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau sumatera dengan wilayah daratan

yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara  $1^{\circ}25''$  LU dan  $0^{\circ},20''$  LS serta antara  $100^{\circ},42'' \sim 103^{\circ},28''$  BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Merati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

**Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Pelalawan Tahun 2017**



*Sumber: RTRW Kabupaten Pelalawan, 2017*

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan sebesar  $13.822,10 \text{ Km}^2$  (termasuk luas lautan)

yang terdiri dari 12 kecamatan, 14 kelurahan, 104 desa, 645 RW dan 1.840 RT. Persentase luas wilayah dan luas masing-masing kecamatan terdapat pada grafik 1.1. dan tabel 1.1 dan dibawah ini.

Wilayah Kabupaten Pelalawan memiliki iklim tropis dengan kondisi topografi daerah yang mempunyai ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 2 M s.d 40 M. Daerah atau kota yang tertinggi adalah Langgam, Pangkalan Kerinci, Sorek I, Pangkalan Lesung, Ukui, Bandar Seikijang dengan tinggi diatas 30 M dan yang terendah adalah Teluk Dalam dengan tinggi 2 M.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan berjumlah 428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%) dengan 103.164 kepala keluarga.

**Tabel 4.1 : Penyebaran jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan 2016**

No	Kecamatan	Luas	Jumlah	Penduduk				Jiwa/
		(km <sup>2</sup> )	KK	Laki-laki	Perem.	Jumlah	%	km <sup>2</sup>
1	Langgam	1,453.07	7,325	16,119	15,128	31,247	7.30	21.50
2	Pangkalan Kerinci	195.32	28,333	61,416	58,922	120,338	28.11	616.11
2	Bandar Sei Kijang	306.87	7,945	18,306	17,080	35,386	8.26	115.31
4	Pangkalan Kuras	1,200.08	14,557	30,727	29,248	59,975	14.01	49.98
5	Ukui	1,345.19	10,067	20,853	18,924	39,777	9.29	29.57
6	Pangkalan Lesung	509.29	8,056	16,611	15,504	32,115	7.50	63.06
7	Bunut	423.00	3,943	7,887	7,760	15,647	3.65	36.99
8	Pelalawan	1,482.65	4,844	10,379	9,476	19,855	4.64	13.39
9	Bandar Petalangan	372.31	3,631	7,161	7,127	14,288	3.34	38.38
10	Kuala Kampar	698.36	4,288	9,218	8,873	18,091	4.23	25.90
11	Kerumutan	956.84	6,045	12,304	11,815	24,119	5.63	25.21
12	Teluk Meranti	4,212.82	4,130	8,773	8,539	17,312	4.04	4.11
	Jumlah	13,155.79	103,164	219,754	208,396	428,150	100.00	32.54

Sumber : Kabupaten Pelalawan tahun 2017

Penyebaran penduduk tidak merata di setiap kecamatan. Penyebaran penduduk yang paling padat sebesar 616,11 jiwa/km<sup>2</sup> berada pada Kecamatan Pangkalan Kerinci dan yang paling jarang sebanyak 4,11 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Teluk Meranti. Tingkat rata-rata penyebaran penduduk dibandingkan luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 32,54 jiwa/km<sup>2</sup>. Untuk mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata pada masing-masing kecamatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang baru di kecamatan yang penduduknya masih jarang dan yang memiliki keunggulan ekonomis serta potensi daerah.

Berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2016 sebanyak 428.150 jiwa,

yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%).

**Tab 4.2 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016**

No	Umur	Jumlah	%	Laki-laki	%	Perempuan	%
1	0-4	53.620	12,52	26.751	12,17	26.869	12,89
2	5-9	45.837	10,71	23.147	10,53	22.690	10,89
3	10-14	38.096	8,90	19.120	8,70	18.976	9,11
4	15-19	34.596	8,08	17.662	8,04	16.934	8,13
5	20-24	39.797	9,30	19.741	8,98	20.056	9,62
6	25-29	45.349	10,59	23.160	10,54	22.189	10,65
7	30-34	40.896	9,55	21.073	9,59	19.823	9,51
8	35-39	36.084	8,43	18.780	8,55	17.304	8,30
9	40-44	30.143	7,04	16.013	7,29	14.130	6,78
10	45-49	22.178	5,18	12.085	5,50	10.093	4,84
11	50-54	16.007	3,74	8.671	3,95	7.336	3,52
12	55-59	10.887	2,54	6.008	2,73	4.879	2,34
13	60-64	6.716	1,57	3.537	1,61	3.179	1,53
14	65-69	3.740	0,87	2.008	0,91	1.732	0,83
15	70-74	2.157	0,50	1.100	0,50	1.057	0,51
16	75+	2.047	0,48	898	0,41	1.149	0,55
	<b>Jumlah</b>	<b>428.150</b>		<b>219.754</b>		<b>208.396</b>	

Sumber : Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

**Tabel 4.3 : Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2016**

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	0 – 4	25,791	25,924	51,715
2.	5 – 9	22,080	21,568	43,648
3.	10 - 14	18,321	18,222	36,543
4.	15 - 19	16,889	16,242	33,131
5.	20 - 24	19,196	19,516	38,712
6.	25 - 29	22,023	21,099	43,122
7.	30 - 34	20,093	19,012	39,105
8.	35 - 39	18,070	16,475	34,545
9.	40 - 44	15,024	13,182	28,206
10.	45 - 49	11,209	9,345	20,554
11.	50 - 54	7,996	6,761	14,757
12.	55 - 59	5,502	4,433	9,935
13.	60 - 64	3,177	2,849	6,026
14.	65 - 69	1,801	1,570	3,371
15.	70 - 74	1,018	981	1,999
16.	75 +	827	1,058	1,885
	<b>JUMLAH</b>	<b>209,017.00</b>	<b>198,237.00</b>	<b>407,254.00</b>

Sumber: Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2017

Secara umum, penduduk Kabupaten Pelalawan bekerja sebagai petani dan nelayan. Kondisi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari daratan dan beberapa pulau. Komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan.**

No.	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan	Jiwa	%
1	Pertanian dan Perikanan	59,70	44,58	225.293	55,32
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
3	Industri	10,40	1,18	31.481	7,73
4	Listrik, Gas dan Air	0,73	0,34	2.525	0,62
5	Bangunan dan Konstruksi	4,17	1,17	13.439	3,30
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	7,94	24,17	51.477	12,64
7	Transportasi dan Komunikasi	4,89	-	14.172	3,48
8	Keuangan dan Asuransi	1,99	1,87	7.941	1,95
9	Jasa	10,18	26,69	60.925	14,96
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>407.254</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Pelalawan Dalam Angka 2017.

Komposisi penduduk yang bekerja sebagai petani dan nelayan (sektor pertanian dan

perikanan) mencapai 55,32 persen meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 55,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan dan kesejahteraan penduduk sangat tergantung pada hasil alam yang rentan terhadap perubahan topografi darat dan laut. Ke depan, program pengembangan sektor pertanian dan perikanan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jika sektor ini dikelola dengan baik maka dampak topografi yang tidak mendukung seperti musim angin utara, musim hujan dan musim kemarau dapat diminimalkan.

Meskipun kekayaan alam Kabupaten Pelalawan diperkirakan cukup memadai beberapa tahun ke depan, kondisi tersebut tidak menjamin bahwa Kabupaten Pelalawan akan mampu bersaing dengan pemerintah daerah lain yang sudah lebih dahulu membenahi SDM-nya. Oleh karena itu, selain menatausahakan kekayaan alam dengan profesional diperlukan juga SDM yang handal di bidangnya sehingga kekayaan alam yang melimpah dapat diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

**Tabel 4.5 : Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pelalawan.**

No	Uraian	Jumlah Penduduk	Jumlah	
			Jiwa	%
1	Belum Sekolah	407.254,00	11.810,37	2,90
2	Belum Tamat SD		80.269,76	19,71
3	SD		118.714,54	29,15
4	SLTP		81.898,78	20,11
5	SMA		96.682,10	23,74
6	Diploma		4.194,72	1,03
7	Sarjana		13.683,73	3,36
	<b>Jumlah</b>			<b>407.254,00</b>

*Sumber: Diolah dari Pelalawan Dalam Angka 2017*

Berdasarkan data tersebut di atas, komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

belum memadai di Kabupaten Pelalawan, karena penduduk yang telah melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi hanya 4,39% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pelalawan. Sedangkan sisanya sebesar 95,61% belum pernah mengecap pendidikan perguruan tinggi.

Kondisi prasarana dan sarana pendidikan, jumlah siswa dan tenaga pendidik di Kabupaten Pelalawan sampai dengan tahun 2016 dapat terlihat pada tabel 1.6 berikut:

**Tabel 4.6 : Jumlah Sarana Sekolah dan Siswa SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Pelalawan Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	SD/MI			JML SISWA	SLTP/MTs			JML SISWA	SMA/SMK		JML SISWA
		N	S	MI		N	S	MTs		N	S	
1	Pangkalan Kerinci	14	12	1	12,726	4	9	3	4,662	4	7	4,432
2	Pangkalan Kuras	28	4	0	8,903	8	1	3	3,368	3	1	1,880
3	Kuala Kampar	24	0	1	2,344	7	0	1	790	2	0	491
4	Ukui	19	5	1	5,248	5	1	4	1,759	2	2	786
5	Kerumutan	21	0	0	3,036	4	0	1	853	2	0	659
6	Langgam	17	1	1	4,724	4	0	4	1,411	3	1	862
7	Pelalawan	14	2	0	2,137	6	0	0	373	1	0	74
8	Teluk Meranti	14	0	0	1,927	4	1	1	715	3	0	424
9	Pangkalan Lesung	14	1	0	3,454	3	0	4	1,109	2	0	970
10	Bunut	14	1	0	2,009	2	0	1	735	2	0	650
11	Bandar Petalangan	11	2	0	2,205	1	2	0	776	1	1	575
12	Bandar Sei Kijang	8	1	0	2,690	3	0	1	1,123	2	1	931
	<b>JUMLAH</b>	<b>198</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>51,403</b>	<b>51</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>17,674</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>12,734</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>231</b>				<b>88</b>			<b>40</b>		

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Pelalawan Tahun 2017.

Dari tabel diatas sampai dengan tahun 2017 jumlah sekolah dasar (SD/MI) adalah sebanyak 231 dengan jumlah siswa 51.403 orang, dan jumlah SMP/MTs sebanyak 88 sekolah dengan jumlah siswa 17.674 orang serta jumlah SMA/SMK sebanyak 40 sekolah dengan jumlah siswa 12.734 orang yang tersebar di dua belas kecamatan.

Indikator mendasar tingkat pendidikan juga diukur dari kemampuan baca-tulis

penduduk dewasa. Kemampuan baca-tulis tercermin dari data angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas huruf latin dan huruf lainnya. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pelalawan tahun 2016, persen penduduk yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) tahun 2015 sebesar 98,87 % dan persentase penduduk yang buta huruf adalah sebesar 1,13 %. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang buta huruf lebih besar dibanding penduduk laki-laki, yaitu 1,84% berbanding 0,45%.

Potensi pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pelalawan relatif besar dan masih sebagian kecil yang dikelola. Luas potensi lahan sawah dan bukan sawah s.d. tahun 2014 adalah 853.815 ha yang terdiri dari lahan sawah 7.439 ha dan non sawah 846.376 ha. Lahan sawah berada pada 10 kecamatan yaitu Langgam, Pangkalan Kuras, Ukui, Pangkalan Lesung, Bunut, Pelalawan, Bandar Petalangan, Kuala Kampar, Kerumutan, dan Teluk Meranti. Sedangkan non sawah tersebar di semua kecamatan.

#### **B. Profil Desa Bukit Gajah**

Pada Tahun 1989 PT. Inti Indosawit membuka Lahan Perkebunan Sawit dan membangun Unit pemukiman yang di peruntukan bagi warga yang mengikuti Program/Pola PirTransmigrasi. Dalam unit Pemukiman tersebut sudah terbentuk Struktur Pengurus Beserta Staff dari berbagai Bidang sebelum datangnya calon penghuni Pemukiman atau peserta Pir Transmigrasi. Adapun Bidang Pengurus Pemukiman tersebut yaitu :

- Kepala UPT VII dan Staff

- Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
- Petugas Kesehatan (Mantri)
- Dai (Pemuka Agama)

Unit pemukiman mulai di tempati masyarakat peserta Transmigrasi yang di datangkan dari berbagai Daerah dengan sistem bergelombang dengan mencapai angka 781 kepala keluarga. Kepengurusan UPT VII berjalan dalam beberapa tahun mulai dari Tahun 1990 sampai dengan Tahun 1996 baru terbentuk Desa Persiapan dan pada Tahun 1998 masuk Desa Definitif yang diberi Nama Desa Bukit Gajah.

Desa Bukit Gajah terbentuk dan terdaftar di pemerintahan pada Tahun 1998 dengan SK Gubernur Riau No.487 / V / 1993. Letak Geografis Desa Bukit Gajah pada titik kordinat 00.36 LS, 00.25 BT. Adapun Yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekdes Desa Bukit Gajah sebagai berikut :

- Periode Tahun 1992 s/d Tahun 1994 Budi Riono dan Sekdes Minin Sunarto (Desa UPT VII)
- Periode Tahun 1995 s/d Tahun 1997 Pjs. Minin Sunarto dan Sekdes Munjirin (Desa UPT VII)
- Periode Tahun 1998 s/d Tahun 1999 H. Bahro dan Sekdes Munjirin (Desa Bukit Gajah )
- Periode Tahun 1999 s/d Tahun 2003 Pjs. Munjirin dan Sekdes Munjirin
- Periode Tahun 2004 s/d Tahun 2005 Plt. Masrohan dan Sekdes
- Periode Tahun 2005 s/d Tahun 2011 Munjirin dan Sekdes Masrohan
- Periode Tahun 2011 s/d Tahun 2017 Munjirin dan Sekdes Masrohan

a) Bataas Wilaayah Deasa

Letaak Geograafi Deasa Bukit Gaajah , terletak diantara :

Sebelah Utara : Keluraahan Ukui Saatu daan Ukui Dua

Sebeelah selaatan : Desa Ukui Dua dan Bukit Jaya

Sebelah Barat : Desa Bukit Jaya, Tri Mulya Jaya, Air Emas

Sebelah Tiimur : Desaa Ukuii Dua

Mengenai jarak ke tempat-tempat umum dan pusat pemerintahan dapat di lihat pada table di bawah ini.

NO	TEMPAT	JARAK (KM)	KET
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	3 KM	
2	Ke Pemerintahan Kabupaten/kota	70 KM	
3	Ke Pemerintahan Propinsi	150 KM	
4	Ke Kantor Kapolres Pelalawan	70 KM	
5	Ke Pasar Bukit Gajah	0 KM	

*Sumber Kantor Desa Bukit Gajah*

Kependudukan, Data Kependudukan Berdasarkan Usia, Jumlah penduduk Desa Bukit Gajah pada tahun 2012 dan tahun 2016 Berdasarkan Usiaa daapat dii lihaat paada taabel dii baawah ini:

NO	UMUR	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016

1	0 – 6 Tahun	264	265	265	263	264
2	7 - 12 Tahun	315	317	318	320	321
3	13 - 18 Tahun	513	514	514	514	515
4	19 - 24 Tahun	514	515	516	518	518
5	25 – 55 Tahun	1607	1607	1609	1609	1610
6	56 – 79 Tahun	107	109	109	110	111
7	80 Tahun Ke atas	11	11	12	15	16
<b>JUMLAH</b>		3319 orang	3325 orang	3330 orang	3349 orang	3355 Orang

*Sumber Kantor Desa Bukit Gajah*

Data Kependudukan Berdasarkan gender, Jumlah penduduk Desa Bukit Gajah Berdasarkan jender dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk	3319 Orang	3325 Orang	3330 Orang	3355 Orang	3355 Orang
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	1660 Orang	1665 Orang	1675 Orang	1680 Orang	1715 Orang
3	Jumlah Penduduk Perempuan	1659 Orang	1660 Orang	1655 Orang	1675 Orang	1640 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	887 KK	890 KK	891 KK	898 KK	953 KK

*Sumber Kantor Desa Bukit Gajah*

Nama-Nama Aparat Desa :

Kepala Desa

: Munjirin

Sekretaris Desa : Bambang Mujiyanto

Kepala Urusan pemerintahan : Muhammad Burhan

Kepala Urusan Umum : Kinanti Sarwendah

Kepala Urusan Pembangunan : Marjuni

Kepala Dusun :

1. Dusun Suka Maju : Wira Gunawan

2. Dusun Suka Jadi : Giyanto

3. Dusun Suka Mulya : Indra Saputra

Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua : Suparmin

Wakil Ketua : Joko Subandriyo

Sekretaris : Teguh Supriyanto

Anggota : 1. Triyono  
2. Budiono  
3. Rakijan

4. Sudarman

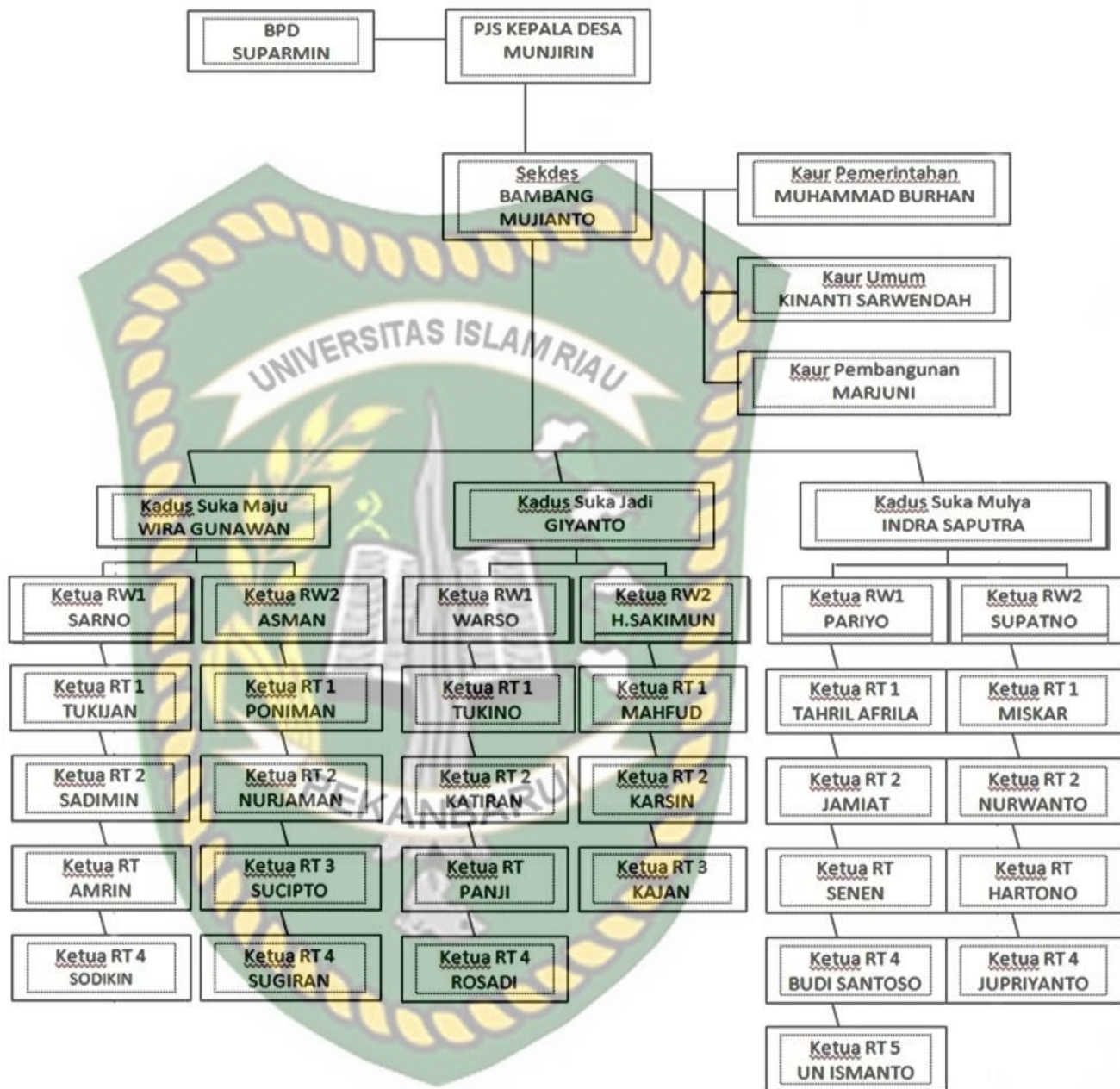
5. Paidi

6. Irwan Efendi

7. Musleh

8. Rusmanto

Struktur Organisasi Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui menganut system kelembagaan pemerintah Desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar sebagai berikut :



Sumber : Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui Tahun 2019

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Responden merupakan salah satu pendukung dalam menentukan hasil penelitian penulis. Responden juga merupakan sangat berperan penting dalam mempermudah penulis melakukan penelitian dengan cara memberikan tanggapan terhadap kuesioner yang penulis ajukan kepada mereka, dan juga dengan memberikan informasi kepada penulis sesuai yang mereka ketahui. Agar penulis mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Camat Ukui 1 orang, Seksi Pembangunan 1 orang, Kepala Desa Bukit Gajah, serta dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Desa Bukit Gajah berjumlah 97 orang sampel.

Sehubungan dengan penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah), diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

#### 1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selain melakukan wawancara juga digunakan dengan cara penyebaran kuesioner, oleh karenanya sangat diperlukan penulis mengetahui identitas masyarakat yang ada di

Desa Bukit Gajah. (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah). Untuk pertama yang perlu di ketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan dipaparkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	60	62%
2	Perempuan	37	38%
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019*

Dari tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden masyarakat sebagai yang ada disekitar pabrik dijadikan sebagai sampel dalam penelitian membahas tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah) adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 60 orang dengan persentase (62%) dan jumlah responden peserta perempuan berjumlah 37 orang dengan persentase (38%) dari total keseluruhan 97 Orang responden masyarakat Desa Bukit Gajah.

## **2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia**

Dari hasil penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah), serta dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada masyarakat yang menjadi

responden, karena usia sangat ditentukan dalam kematangan dalam menilai, dan tentunya usia yang dipilih adalah masyarakat yang memiliki pemikiran yang sehat dan sudah memiliki keputusan dalam hidupnya. Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia masyarakat yang di jadikan responden:

**Tabel V.2: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	0	0%
2	31-40 Tahun	55	57%
3	41-50 Tahun	42	43%
4	>50 Tahun	0	0%
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019*

Dari tabel V.2 di atas dinyatakan bahwa responden dari masyarakat dominan memiliki usia dari interval 31-40 Tahun yaitu berjumlah 55 orang dengan persentase 57%, dan yang paling minim adalah usia 41-50 Tahun berjumlah 42 orang dengan persentase 45% dari jumlah total keseluruhan masyarakat yaitu 97 orang.

### 3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah), maka identitas responden masyarakat yang ada disekitar pabrik karet dalam penelitian ini

yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, karena pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaianya atau komunikasi akan berbeda dengan masyarakat yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan dalam bentuk Tabel:

**Tabel V.3 :Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Masyarakat**

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	3	3%
3	SMA	70	72%
4	Diploma	6	6%
5	Sarjana S1/S2	18	16%
<b>Jumlah</b>		<b>97</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden masyarakat yang ada disekitar pabrik karet dominan memiliki pendidikan SMA yaitu berjumlah 70 responden dengan persentase 72%, selanjutnya tingkat pendidikan S1 berjumlah 18 responden dengan persentase 16%, dan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 6 responden dengan persentase 6%, dan tingkat pendidikan Sarjana S1/S2 berjumlah 18 responden dengan persentase 16%, dan yang paling minim adalah tingkat pendidikan SMP berjumlah 3 responden dengan persentase 3%.

**B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)**

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan disusun dalam bentuk tabel dan diuraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah). Dan di dalam setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Kesatuan Tindakan, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

**1. Kesatuan Tindakan**

Kesatuan tindakan merupakan pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan

organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri Standar, merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang pertama yaitu tentang Kesatuan Tindakan maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.4 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kesatuan Tindakan**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pelaksanaan Kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Camat dalam menjalankan Pemerintah Desa.	5	25	67	97
2	Camat memberikan arahan kepada bawahan untuk melaksanakan program Pemberdayaan	2	25	70	97

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.4 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator pertama yang membahas tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Kesatuan Tindakan yang dinilai pada item pertama yaitu pelaksanaan kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Camat dalam menjalankan

Pemerintah Desa, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 5 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 25 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 67 orang.

Pada item kedua yaitu Camat memberikan arahan kepada bawahan untuk melaksanakan program pemberdayaan yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 2 orang, selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” berjumlah 25 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 70 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Kesatuan Tindakan**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
		3	2	1	
1	Pelaksanaan Kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Camat dalam menjalankan Pemerintah Desa.	15	50	67	132

2	Camat memberikan arahan kepada bawahan untuk melaksanakan program Pemberdayaan	6	50	70	126
<b>Total Skor</b>					<b>258</b>
<p><b>Skor Tertinggi</b> = <math>97 \times 3 = 291</math>  <b>2 Indikator</b> = <math>291 \times 2 = 582</math>  <b>Persentase Jawaban Responden</b> <math>\frac{258}{582} \times 100\% = 44\%</math></p>					

*Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019*

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada indikator Kesatuan Tindakan memperoleh hasil 44% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Adapun alasan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan hasil pada penyebaran kuesioner di atas yaitu “Cukup Terlaksana” adalah dikarenakan proses pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan perekonomian masyarakat memang sudah di susun dan di sosialisasikan, tetapi pelaksanaannya dilapangan belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, tentunya masyarakat berharap akan program tersebut dapat meningkatkan kehidupan perekonomian mereka, tetapi fakta nya pelaksanaan dilapangan belum berjalan merata dan menjankau seluruh masyarakat yang ada di Desa Bukit Gajah.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapat di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan penulis dari pihak Kantor Kecamatan dan juga Kantor Desa Bukit Gajah dimana tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui fakta dilapangan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang tugas dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Gajah, adapun yang menjadi informan penulis dalam penelitian ini adalah Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos selaku Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui, dan Bapak Taryam, SE selaku kepala Desa Bukit Gajah, dan adapun hasil wawancara penulis dengan beliau-beliau tersebut yang berkaitan dengan pembahasan indikator di atas adalah sebagai berikut ini:

*“Tentunya sudah dilaksanakan masing-masing fungsi dari struktur organisasi di Kecamatan, kita sudah koordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan pada tahun ini, baik itu terkait dengan pemberdayaan ataupun tugas-tugas lainnya, dan khusus untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Bukit Gajah, saya rasa untuk lebih jelasnya saudara dapat menanyakannya langsung kepada Kepala Desa nya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pemberian informasi, apalagi informasi yang saudara butuhkan adalah bersifat informasi formal seperti ini”*. (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui)

Sesuai dengan hasil informasi yang penulis dapatkan pada wawancara dengan perwakilan dari kantor Camat Ukui yang di wakikan oleh Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos di atas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan desa yang di berikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Gajah yaitu Bapak Taryam, SE. dimana hasil wawancaranya adalah:

*“Tentunya sudah, Koordinasi sudah dilakukan, dan pelaksanaan masing-masing program juga sudah di rapatkan, dan semua program-program yang kita rencanakan sedang berjalan, memang kendala yang di hadapi adalah tidak mampunya kita menjalankan program tersebut dengan sukses sepenuhnya, tentunya banyak kendala yang kita hadapi di dalam pelaksanaannya, baik itu dari segit internal atau pun external nya sendiri, contohnya seperti anggaran yang memang sangat terbatas untuk melakukan pemberdayaan yang banyak sekali macam-macam program nya” (Wawancara Tanggal 16 Januari 2019, Bapak Taryam, SE. Kepala Desa Bukit Gajah)*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa proses peaksanaan kebijakan dalam menjalankan fungsi camat dan juga pelaksanaan pengarahan yang dilakukan kepada aparatur pemerintahan Desa Bukit Gajah memang sudah di jalankan oleh pihak Kecamatan dan di konfirmasi secara langsung oleh Kepada Desa Bukit Gajah yaitu Bapak Taryam, sementara itu untuk fakta yang terjadi dilapangan, penulis akan menyajikannya berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung dilapangan.

Dimana berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa proses pengarahan yang terjadi memang sudah berjalan sesuai dengan pengakuan dari masing-masing informan yang kompeten dalam penelitian ini, tetapi yang menjadi masalah adalah pelaksanaan tugas tersebut tidak menjangkau masyarakat secara luas, dimana program-program yang di akui sudah di jalankan dan di lakukan koordinasi masih belum terlihat dampaknya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Desa Bukit Gajah yang harus mampu memberikan dampak yang dapat di rasakan oleh masyarakat khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan perekonomian dari masing-

masing pelaku yang terlibat di dalam proses program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Selanjutnya penulis akan menyajikan pembahasan pada indikator yang ke dua dimana pembahasan untuk indikator ini berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Ukui ataupun dari pihak Pemerintahan Desa yang nantinya dapat dipahami oleh masyarakat dan tentunya terjadinya transparansi pelaksanaan program yang dirasakan oleh masyarakat. Untuk melihat hasil pembahasannya, maka penulis akan sajikan dibawah ini:

## 2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan koordinasi, karena tingkat keberhasilan dalam koordinasi adalah terletak pada komunikasi.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang kedua yaitu tentang Komunikasi maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Komunikasi**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang ada di Kecamatan	3	18	76	97
2	Adanya sikap terbuka kepada masyarakat akan program yang telah dilaksanakan	2	23	72	97

*Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019*

Dari data tabel V.6 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator kedua yang membahas tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Komunikasi yang dinilai pada item pertama yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang ada di Kecamatan, terkait dengan tugas dan fungsi Camat dalam menjalankan Pemerintah Desa, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 3 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 18 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 76 orang.

Pada item kedua yaitu adanya sikap terbuka kepada masyarakat akan program yang telah dilaksanakan memberikan tanggapan pada kategori “Telaksana” berjumlah 2 orang, selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” berjumlah 23 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 72 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

**Tabel V.7 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kesatuan Komunikasi**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
		3	2	1	
1	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program yang ada di Kecamatan	9	36	76	121
2	Adanya sikap terbuka kepada masyarakat akan program yang telah dilaksanakan	6	46	72	124
<b>Total Skor</b>					<b>245</b>
<b>Skor Tertinggi = 97 x 3 = 291</b> <b>2 Indikator = 291 x 2 = 582</b>  <b>Persentase Jawaban Responden</b> $\frac{245}{582} \times 100\% = 42\%$					

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada indikator Komunikasi memperoleh hasil 42% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan penulis dari pihak Kantor Kecamatan dan juga Kantor Desa Bukit Gajah dimana tujuan dari

wawancara ini adalah untuk mengetahui fakta dilapangan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang tugas dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Gajah, adapun yang menjadi informan penulis dalam penelitian ini adalah Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos selaku Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui, dan Bapak Taryam, SE selaku kepala Desa Bukit Gajah, dan adapun hasil wawancara penulis dengan beliau-beliau tersebut yang berkaitan dengan pembahasan indikator di atas, dimana adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut ini:

*“Proses sosialisasi menjadi ranah dari masing-masing pemerintahan Desa, dimana kepala Desa lah nantinya yang melakukan proses tersebut, terserah dengan cara gimana, yang penting sifatnya sosialisasi, dan pada saat kegiatan tersebut dilakukan, barulah kita sebagai pihak Kecamatan ikut di dalamnya untuk melakukan salah satu fungsi kita dalam proses pengawasan”*. (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui)

Sesuai dengan hasil informasi yang penulis dapatkan pada wawancara dengan perwakilan dari kantor Camat Ukui yang di wakikan oleh Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos di atas, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan desa yang di berikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Gajah yaitu Bapak Taryam, SE. kaitannya dengan wawancara sebelumnya di atas adalah untuk konfirmasi pernyataan yang telah diberikan oleh perwakilan dari pihak Kecamatan, dan adapun hasil wawancaranya dari kepada desa adalah berikut ini:

*“Sosialisasi sudah dilakukan, dan tahun lalu kita juga telah mengumpulkan masyarakat untuk memberitahukan dan juga melakukan penyuluhan terhadap program pemberdayaan ini, salah satunya budi daya ayam buras, dimana masyarakat kita panggil dan kita berikan sosialisasi terkait dengan alokasi dana*

*yang dapat di manfaatkan untuk proses budi daya perternakan atau pertanian yang ada di Desa Bukit Gajah” (Wawancara Tanggal 16 Januari 2019, Bapak Taryam, SE. Kepala Desa Bukit Gajah)*

Diluar dari jawaban yang telah penulis dapatkan di atas, penulis juga mendapatkan fakta dilapangan yang mana fakta tersebut di dapatkan dari hasil observasi langsung ke Desa Bukit Gajah dan menanyakan serta melihat situasi yang terjadi, dan fakta yang penulis dapat adalah dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Gajah, dan selain dari fakta tersebut, fakta lainnya juga menunjukkan bahwa ada masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut dan pernah mengajukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah Desa, tetapi tidak disetujui karna kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian penulis pada indikator yang ke 3 (tiga) dimana pembahasannya adalah tentang Pembagian Kerja, dan adapun hasil penelitian dan pengumpulan data nya adalah:

### **3. Pembagian Kerja**

Pembagian kerja merupakan perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang ketigas yaitu tentang Pembagian Kerja maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Pembagian Kerja**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Mengikutsertakan masyarakat pada setiap perencanaan program	3	32	63	97
2	Membangun koordinasi kepada bidang yang bertanggung jawab dalam menjalankan program bersama masyarakat	2	27	68	97

*Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019*

Dari data tabel V.8 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator ketiga yang membahas tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Pembagian Kerja yang dinilai pada item pertama yaitu Mengikutsertakan masyarakat pada setiap perencanaan program, terkait dengan tugas dan fungsi Camat dalam menjalankan Pemerintah Desa, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 3 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 32 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 63 orang.

Pada item kedua yaitu adanya sikap terbuka kepada masyarakat akan program yang telah dilaksanakan memberikan tanggapan pada kategori “Telaksana” berjumlah 2 orang, selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup

Terlaksana” berjumlah 27 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 68 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

**Tabel V.9 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kesatuan Pembagian Kerja**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
		3	2	1	
1	Mengikutsertakan masyarakat pada setiap perencanaan program	9	64	63	136
2	Membangun koordinasi kepada bidang yang bertanggung jawab dalam menjalankan program bersama masyarakat	6	54	68	128
<b>Total Skor</b>					<b>254</b>
<p><b>Skor Tertinggi = 97 x 2 = 291</b>  <b>2 Indikator = 291 x 2 = 582</b></p> <p><b>Persentase Jawaban Responden</b> <math>\frac{254}{582} \times 100\% = 44\%</math></p>					

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada indikator Pembagian Kerja memperoleh hasil 44% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan penulis dari pihak Kantor Kecamatan dan juga Kantor Desa Bukit Gajah dimana tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui fakta dilapangan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang tugas dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Gajah, adapun yang menjadi informan penulis dalam penelitian ini adalah Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos selaku Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui, dan Bapak Taryam, SE selaku kepala Desa Bukit Gajah, dan adapun hasil wawancara penulis dengan beliau-beliau tersebut yang berkaitan denga pembahasan indikator di atas, dimana adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut ini:

*“Pastinya, masyarakat selalu dilibatkan untuk setiap program-program yang akan di laksanakan, karna pada dasarnya program tersebut adalah untuk masyarakat, apabila masyarakat menerima maka program akan terus di jalankan, tetapi apabila masyarakat menolak, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada masyarakat, dan koordinasi selalu dilakukan, baik kepada pemerintahan Desa Bukit Gajah, ataupun kepada pemegang kepentingan di masyarakat, baik itu tetua adat, tetua kampong, RT ataupun RW nya masing-masing”.* (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui)

Untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam melengkapi hasil penelitian penulis, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan desa yang di berikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Gajah yaitu Bapak Taryam, SE. kaitannya dengan wawancara sebelumnya di atas adalah untuk konfirmasi pernyataan yang telah diberikan oleh perwakilan dari pihak Kecamatan, dan adapun hasil wawancaranya dari kepada desa adalah berikut ini:

*“Masyarakat memegang kunci dari program yang akan di luncurkan, apabila dalam sosialisasi yang dilakukan masyarakat tidak menginginkan atau kurang setuju dengan program tersebut, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan dalam proses perencananya, sebelum dilakukan sosialisasi, tentunya kita juga telah berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat yang di anggap memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, tujuannya adalah untuk mendiskusikan program tadi, apakah di anggap layak dan dibutuhkan masyarakat atau sebaliknya.”* (Wawancara Tanggal 16 Januari 2019, Bapak Taryam, SE. Kepala Desa Bukit Gajah)

Berdasarkan fakta dilapangan, dimana dalam program observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan kenyatannya yang mana masyarakat mengakui bahwa memang program yang di tawarkan oleh pemerintah Kecamatan ataupun Pemerintah Desa cukup menarik, tetapi kendala yang dihadapi adalah proses pemberdayaan yang memang belum dapat di rasakan sepenuhnya.

#### **4. Disiplin**

Disiplin merupakan menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. Disiplin adalah sebuah kesuksesan dalam menjalankan sesuatu baik itu melaksanakan tugas pada pemertinatan maupun sukses dalam berwirausaha.

Untuk mengetahui hasil penelitian yang penulis lakukan dan berkaitan dengan indikator yang ketiga yaitu tentang Disiplin maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran angket dalam bentuk tabel dan analisis di bawah ini:

**Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Disiplin**

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Program yang telah dilaksanakan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	4	16	77	97
2	Program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan	7	14	76	97

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.10 di atas diketahui tanggapan responden untuk indikator keempat yang membahas tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam Disiplin yang dinilai pada item pertama yaitu Program yang telah dilaksanakan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, terkait dengan tugas dan fungsi Camat dalam menjalankan Pemerintah Desa, yang memberikan tanggapan pada kategori “Terlaksana” berjumlah 4 orang, selanjutnya pada kategori “Cukup Terlaksana” sebanyak 16 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 77 orang.

Pada item kedua yaitu Program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan memberikan tanggapan pada kategori “Telaksana” berjumlah 7 orang, selanjutnya masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Cukup Terlaksana” berjumlah 14 orang, sedangkan masyarakat yang memberikan tanggapan pada kategori “Tidak Terlaksana” berjumlah 76 orang.

Dari hasil yang telah penulis dapatkan di atas, penulis akan mencoba menyajikan analisis distribusi jawaban responden dengan menyajikan total score yang didapat pada masing-masing jawaban responden masyarakat pada penelitian ini, dan adapun hasil yang di dapat adalah sebagai berikut:

**Tabel V.11 : Analisis Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Kesatuan Disiplin**

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
		3	2	1	
1	Program yang telah dilaksanakan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	12	32	77	121
2	Program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan	21	28	76	125
<b>Total Skor</b>					<b>246</b>
<b>Skor Tertinggi = 97 x 3 = 291</b> <b>2 Indikator = 291 x 2 = 582</b>					
<b>Persentase Jawaban Responden</b> $\frac{246}{582} \times 100\% = 42\%$					

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Dilapangan 2019

Berdasarkan tabel di atas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada indikator Disiplin memperoleh hasil 42% dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Berdasarkan jawaban yang telah didapatkan di atas, masyarakat yang memberikan jawaban mereka pada kategori paling dominan yaitu “Cukup Terlaksana”, juga memberikan alasan mereka memiliki jawaban tersebut, dimana alasannya adalah dikarenakan program yang telah di rencanakan memang dilaksanakan pada tahun 2018, tetapi fakta lainnya yang penulis temukan adalah dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak mengetahui berapa anggaran yang di sediakan dalam proses pelaksanaan program tersebut. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan penelitian penulis, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian ini.

Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis dapatka di atas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan penulis dari pihak Kantor Kecamatan dan juga Kantor Desa Bukit Gajah dimana tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui fakta dilapangan yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang tugas dan fungsi dari pemberdayaan masyarakat di Desa Bukit Gajah, adapun yang menjadi informan penulis dalam penelitian ini adalah Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos selaku Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui, dan Bapak Taryam, SE selaku kepala Desa Bukit

Gajah, dan adapun hasil wawancara penulis dengan beliau-beliau tersebut yang berkaitan dengan pembahasan indikator di atas, dimana adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut ini:

“Program yang sudah berjalan pada tahun lalu, saya rasa sudah cukup baik pelaksanaannya, dimana masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program tersebut, baik dari program budi daya peternakan ataupun program pertanian yang di usung oleh Kecamatan dan Desa Bukit Gajah, tentunya tujuan utamanya adalah untuk memandirikan masyarakat dalam hal meningkatkan sosial kehidupan mereka”. (Wawancara Tanggal 14 Januari 2019, Bapak Tri Arso Sakti J, S.Sos. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ukui)

Untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam melengkapi hasil penelitian penulis, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan perwakilan desa yang di berikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Gajah yaitu Bapak Taryam, SE. kaitannya dengan wawancara sebelumnya di atas adalah untuk konfirmasi pernyataan yang telah diberikan oleh perwakilan dari pihak Kecamatan, dan adapun hasil wawancaranya dari kepada desa adalah berikut ini:

*“Tentunya harapan kita, banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, tetapi tidak semua harapan dapat di capai, memang masih banyak masyarakat yang belum dapat di kabulkan permintaannya karena beberapa faktor dan persyaratan yang masih kurang, tetapi secara keseluruhan, pelaksanaan program ini sudah berjalan sesuai dengan yang di inginkan, terutama program-program pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan pertanian dan peternakan”* (Wawancara Tanggal 16 Januari 2019, Bapak Taryam, SE. Kepala Desa Bukit Gajah)

Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan dilapangan, penulis melihat bahwa pelaksanaan program pemberdayana masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bukit Gajah belum berjalan dengan maksimal, dimana program tersebut berjalan seperti setengah-setengah, dan banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui akan

keberadaan dari program tersebut, bahkan beberapa masyarakat mengakui jika program tersebut tidak dapat di manfaatkan karna mereka sudah beberapa kali mengajukan tetapi di berikan penolakan oleh Desa Bukit Gajah.

**C. Rekapitulasi Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)**

Adapun hasil rekapitulasi pada penelitian ini adalah untuk menyimpulkan keseluruhan jawaban yang telah di dapatkan dari penyebaran kuesioner penulis kepada responden masyarakat, dimana hasil kuesionernya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.12 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kec.Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)**

No	Indikator	Rekapitulasi
1	Kesatuan Tindakan	44%
2	Komunikasi	42%
3	Pembagian Kerja	44%
4	Disiplin	42%
<b>Total</b>		<b>172%</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>43%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019*

Berdasarkan data pada tabel V.8 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden masyarakat dari keseluruhan sampel yang ada

pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “*Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin*”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden masyarakat yang ada di Desa Bukit Gajah pada kategori jawaban “Cukup Terlaksana” dengan rata-rata 43% responden masyarakat dari total keseluruhan jumlah responden masyarakat yaitu 97 orang responden.

Kesimpulan yang didapatkan di atas beralasan karena pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bukit Gajah belum berjalan dengan baik meskipun program yang mencakup beberapa sektor sudah ada yang terlaksana seperti pemberdayaan di bidang pertanian dan juga pelestarian lingkungan, akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan dalam konteks budidaya pada peternakan yang ada di Desa Bukit Gajah belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan pemilik usaha-usaha peternakan di Desa Bukit Gajah mengakui bahwa mereka belum mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Ukui, dan beberapa masyarakat yang menjadi responden penulis dalam penelitian ini mengakui bahwa mereka sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk bantuan dan dukungan pengembangan usaha peternakan mereka, tetapi tetap juga mendapatkan penolakan dari Pemerintah Desa dengan alasan yang kurang dimengerti oleh masyarakat, dimana proses pengajuan proposal bantuan dana yang dilakukan adalah untuk Budidaya peternakan ayam buras di Desa Bukit Gajah.

**D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah.**

Dalam upaya menjalankan perannya untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, tentunya baik Pemerintah Kecamatan ataupun pemerintah Desa mengalami beberapa kendala yang berkaitan dengan penelitian penulis ini, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak Pemerintah Desa Bukit Gajah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Budi Daya Peternakan adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat adalah keterbatasan Dana yang di anggarkan untuk proses pemberdayaan tersebut, hal ini tentunya berdampak kepada jumlah masyarakat dan nominal bantuan yang dapat di penuhi. Dengan alasan tersebut, proposal-proposal yang di ajukan masyarakat dalam permohonan bantuan dana untuk budi daya atau pembangunan usaha yang di jalankan mengalami proses yang cukup panjang dan persyaratan yang sangat ketat guna mendapatkan bantuan yang diberikan.
2. Kurang aktif nya masyarakat untuk melakukan terobosan dalam upaya menciptakan usaha-usaha baru yang nantinya dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka, padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat agar aktif di bidang budidaya peternakan ataupun pertanian.

3. Kurangnya jumlah Sumber Daya yang di miliki oleh aparaturnya Desa Bukit Gajah, baik itu sumber daya manusia (SDM) ataupun sumber daya diluar manusia, seperti sarana dan prasana, yang berguna untuk mengembangkan proses pemberdayaan di masyarakat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan yang telah dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian yang membahas tentang “Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan (Studi: Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukit Gajah)” dapat dikategorikan berjalan dengan “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata yang didapatkan oleh penulis dari hasil observasi dengan cara kuisioner dan wawancara langsung dilapangan yaitu rata-ratanya adalah 43% orang responden masyarakat, rata-rata ini di dapatkan dari total keseluruhan pertanyaan yang di ajukan kepada responden adalah sebanyak 97 orang responden.

Kategori “Cukup Terlaksana” yang penulis dapatkan dari penelitian ini menandakan bahwa Proses Pemberdayaan yang terjadi di Desa Bukit Gajah belum berjalan secara maksimal di seluruh aspek yang dijadikan indikator dalam menganalisa penelitian ini. hal ini didukung dengan beberapa fakta-fakta dilapangan dimana masyarakat masih memberikan jawaban dan keterangan bahwa masih ada beberapa aspek yang kurang dalam proses pelaksanaan program di Daerah Mereka yaitu Desa Bukit Gajah, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Kesimpulan yang didapatkan di atas berasal karena pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bukit Gajah belum berjalan dengan baik meskipun program yang mencakup beberapa sektor sudah ada yang terlaksana seperti pemberdayaan di bidang pertanian dan juga pelestarian lingkungan, akan tetapi pemberdayaan yang dilakukan dalam konteks budidaya pada peternakan yang ada di Desa Bukit Gajah belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan pemilik usaha-usaha peternakan di Desa Bukit Gajah mengakui bahwa mereka belum mendapatkan bantuan dari pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Ukui, dan beberapa masyarakat yang menjadi responden penulis dalam penelitian ini mengakui bahwa mereka sudah beberapa kali mengajukan permohonan untuk bantuan dan dukungan pengembangan usaha peternakan mereka, tetapi tetap juga mendapatkan penolakan dari Pemerintah Desa dengan alasan yang kurang dimengerti oleh masyarakat, dimana proses pengajuan proposal bantuan dana yang dilakukan adalah untuk Budidaya peternakan ayam buras di Desa Bukit Gajah.

Dalam upaya menjalankan perannya untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, tentunya baik Pemerintah Kecamatan ataupun pemerintah Desa mengalami beberapa kendala yang berkaitan dengan penelitian penulis ini, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak Pemerintah Desa Bukit Gajah dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Budi Daya Peternakan adalah sebagai berikut:

4. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat adalah

keterbatasan Dana yang di anggarkan untuk proses pemberdayaan tersebut, hal ini tentunya berdampak kepada jumlah masyarakat dan nominal bantuan yang dapat di penuhi. Dengan alasan tersebut, proposal-proposal yang di ajukan masyarakat dalam permohonan bantuan dana untuk budi daya atau pembangunan usaha yang di jalankan mengalami proses yang cukup panjang dan persyaratan yang sangat ketat guna mendapatkan bantuan yang diberikan.

5. Kurang aktif nya masyarakat untuk melakukan terobosan dalam upaya menciptakan usaha-usaha baru yang nantinya dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka, padahal pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat agar aktif di bidang budidaya peternakan ataupun pertanian.
6. Kurangnya jumlah Sumber Daya yang di miliki oleh aparaturnya Desa Bukit Gajah, baik itu sumber daya manusia (SDM) ataupun sumber daya diluar manusia, seperti sarana dan prasana, yang berguna untuk mengembangkan proses pemberdayaan di masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintahan di Kecamatan Ukui khususnya di Desa Bukit Gajah. Kemudian saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak di atas adalah:

1. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Kecamatan Ukui ataupun Kepada Aparatur Pemerintahan Desa agar mau mengajukan penambahan Anggaran yang akan di alokasikan kepada program pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, baik itu di bidang peternakan, pertanian, perikanan dan juga bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya.
2. Penulis memberikan saran kepada masyarakat agar lebih aktif melihat peluang yang ada di sekitar mereka, khususnya dibidang peternakan, perkebunan, dan proses lainnya. Dimana dalam hal ini yang penulis tarik kesimpulannya adalah, masyarakat seolah-olah tidak peduli dengan anggaran untuk memberdayakan mereka karna sudah berfikiran bahwa dana tersebut tidak akan mudah dicairkan.
3. Penulis menyarankan kepada pihak Pemerintah Desa Bukit Gajah agar mau menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pemerintahannya, hal ini tentunya memiliki banyak manfaat dan keberlangsungan organisasi tersebut, apabila SDM sudah mencukupi dalam pelaksanaan pekerjaan di Kantor Desa, maka proses pelaksanaan program tersebut juga akan memakan waktu yang singkat dan efisien tanpa harus bergantung keberapa pegawai yang tersedia saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan & Inovasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Mediaterra.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Budiyono. 2004. *Statistika Dasar untuk Penelitian*. Surakarta: FKIP UNS Press
- Bejo Siswanto. 2011. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BPFE
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah,Edisi Revisi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hasibuan, H. Malayu. S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, cetakan kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, H. Malayu. S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. S.P 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia (EdisiRevisi)*. Jakarta: BumiAksara.
- Inu Kencana Syafie.2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusdi. 2011. *Budaya Organisasi Teori, Penelitian, dan Praktik*.Jakarta: Salemba Empat
- M. Manullang. 2002. *Dasar-dasar Manajemen (cetakan 16)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Pabundu Tika. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Cetakan ke-3*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Sutarto. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Sondang P, Siagian. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (Cetakan Kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sondang P, Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sondang P, Siagian. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syaukani, ad all, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Sunit Agus Tri Cahyono. 2009. Pemberdayaan Terintegrasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. VIII, No 28, Juni 2009, Hal. 28-47.
- Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Terry, R. George. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Cetakan Ke 7*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Usman Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Cetakan Pertama*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, Fungsi Fungsi Manajemen, Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli. 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen, Fungsi Fungsi Manajemen, Pengantar Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

**DOKUMENTASI:**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

